



BkkbN

PEMETAAN

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA



Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
2018



**PEMETAAN
PEMBINAAN KETAHANAN
KELUARGA LANSIA**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dra. Widati, MM

(Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan)

Penanggung Jawab

Drs. Syarifudin

(Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan)

Penulis dan Pengolah Data

Sukardi, S.Sos, MM; Nia Yuleyantye, SH; Hemiliana Dwi Putri, S.Psi., Psi;

Luthfiah S.K.M; Erika Herry, S.Si;

Kontributor :

Dra Siti Isminatun, MM; Rany Widashanti, S.Sos., M.Si; Hidayat SE; Aris Suyanto, SE;
Gunawan, SE; Sumiyati, SE.

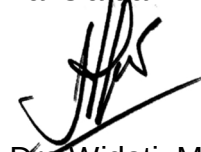
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya maka, Buku Pemetaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia telah selesai disusun dan merupakan acuan bagi pengelola BKL dalam meningkatkan pembinaan.

Undang –Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 48 Ayat (1) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga kecil bahagia sejahtera. Pembangunan keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga salah satunya melalui peningkatan kualitas lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga. Dengan meningkatnya kualitas keluarga akan berimplikasi meningkatnya kesejahteraan keluarga sehingga akan dapat mewujudkan kualitas keluarga. Direktorat Bina Keluarga dan Rentan berupaya meningkatkan kualitas penduduk lansia. Salah satu upaya tersebut melalui program pembinaan kelompok BKL.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan program di lapangan, maka diperlukan pemetaan dan data yang menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BKL. Dengan demikian diharapkan dalam perencanaan dan pengelolaan program ke depannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan dan diharapkan akan memunculkan rekomendasi yang akan diberikan dalam keberlangsungan program, serta diharapkan buku Pemetaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dapat meningkatkan kinerja, baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga Kecamatan.

Jakarta, 31 Desember 2018
Direktur Bina Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan,



Dra Widati, MM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. METODE.....	2
D. KETERBATASAN.....	2
BAB II RENCANA STRATEGIS	3
A. RENCANA STRATEGIS BKKBN TAHUN 2015-2019	3
B. RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA TAHUN 2015-2019.....	4
C. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN TAHUN 2015-2019	4
BAB III PEMETAAN KELOMPOK KEGIATAN BKL.....	6
A. PENDATAAN KELUARGA 2015	6
B. PETA KELOMPOK KEGIATAN BKL NASIONAL	6
C. PETA KELOMPOK KEGIATAN BKL PROVINSI	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN.....	79
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019	4
Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019	5
Tabel 4 Data Keluarga Lansia Nasional	6
Tabel 5 Data Keluarga Lansia Provinsi Aceh	9
Tabel 6 Data Keluarga Lansia Provinsi Sumatera Utara	11
Tabel 7 Data Keluarga Lansia Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 8 Data Keluarga Lansia Provinsi Riau	15
Tabel 9 Data Keluarga Lansia Provinsi Jambi.....	17
Tabel 10 Data Keluarga Lansia Provinsi Sumatera Selatan.....	19
Tabel 11 Data Keluarga Lansia Provinsi Bengkulu	21
Tabel 12 Data Keluarga Lansia Provinsi Lampung	23
Tabel 13 Data Keluarga Lansia Provinsi Bangka Belitung	25
Tabel 14 Data Keluarga Lansia Provinsi Kepulauan Riau.....	27
Tabel 15 Data Keluarga Lansia Provinsi DKI Jakarta.....	29
Tabel 16 Data Keluarga Lansia Provinsi Jawa Barat	31
Tabel 17 Data Keluarga Lansia Provinsi Jawa Tengah.....	33
Tabel 18 Data Keluarga Lansia Provinsi D.I. Yogyakarta.....	36
Tabel 19 Data Keluarga Lansia Provinsi Jawa Timur.....	38
Tabel 20 Data Keluarga Lansia Provinsi Banten	41
Tabel 21 Data Keluarga Lansia Provinsi Bali	43
Tabel 22 Data Keluarga Lansia Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	45
Tabel 23 Data Keluarga Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	47
Tabel 24 Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Barat.....	49
Tabel 25 Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Tengah	51
Tabel 26 Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Selatan	53
Tabel 27 Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Timur	55
Tabel 28 Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Utara.....	57
Tabel 29 Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Utara	59
Tabel 30 Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Tengah	61
Tabel 31 Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Selatan	63
Tabel 32 Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Tenggara.....	65
Tabel 33 Data Keluarga Lansia Provinsi Gorontalo.....	67
Tabel 34 Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Barat	69
Tabel 35 Data Keluarga Lansia Provinsi Maluku	71
Tabel 36 Data Keluarga Lansia Provinsi Maluku Utara	73
Tabel 37 Data Keluarga Lansia Provinsi Papua Barat	75
Tabel 38 Data Keluarga Lansia Provinsi Papua	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kesertaan BKL Nasional Tahun 2018	8
Gambar 2 Peta Kesertaan BKL Nasional Tahun 2017	8
Gambar 3 Peta Kesertaan BKL Provinsi Aceh	10
Gambar 4 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sumatera Utara	12
Gambar 5 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sumatera Barat	14
Gambar 6 Peta Kesertaan BKL Provinsi Riau	16
Gambar 7 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jambi.....	18
Gambar 8 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sumatera Selatan	20
Gambar 9 Peta Kesertaan BKL Provinsi Bengkulu	22
Gambar 10 Peta Kesertaan BKL Provinsi Lampung	24
Gambar 11 Peta Kesertaan BKL Provinsi Bangka Belitung	26
Gambar 12 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kepulauan Riau	28
Gambar 13 Peta Kesertaan BKL Provinsi DKI Jakarta	30
Gambar 14 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jawa Barat	32
Gambar 15 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jawa Tengah.....	35
Gambar 16 Peta Kesertaan BKL Provinsi D.I. Yogyakarta	37
Gambar 17 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jawa Timur.....	40
Gambar 18 Peta Kesertaan BKL Provinsi Banten.....	42
Gambar 19 Peta Kesertaan BKL Provinsi Bali	44
Gambar 20 Peta Kesertaan BKL Provinsi Nusa Tenggara Barat	46
Gambar 21 Peta Kesertaan BKL Provinsi Nusa Tenggara Timur	48
Gambar 22 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Barat.....	50
Gambar 23 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Tengah	52
Gambar 24 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Selatan	54
Gambar 25 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Timur	56
Gambar 26 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Utara	58
Gambar 27 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Utara	60
Gambar 28 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Tengah.....	62
Gambar 29 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Selatan.....	64
Gambar 30 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Tenggara	66
Gambar 31 Peta Kesertaan BKL Provinsi Gorontalo	68
Gambar 32 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Barat	70
Gambar 33 Peta Kesertaan BKL Provinsi Maluku.....	72
Gambar 34 Peta Kesertaan BKL Provinsi Maluku Utara.....	74
Gambar 35 Peta Kesertaan BKL Provinsi Papua Barat	76
Gambar 36 Peta Kesertaan BKL Provinsi Papua.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Dalam melaksanakan tugas selanjutnya fungsi BKKBN dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 bahwa Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Sedangkan Kebijakan nasional pembangunan keluarga diarahkan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS; memberdayakan fungsi keluarga; memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan memberdayakan peran serta masyarakat, memandirikan keluarga; memberdayakan kearifan lokal; meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup.

BKKBN melalui Kedeputan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang diarahkan pada 4 aspek tahapan peningkatan kualitas yaitu (1) meningkatkan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; (2) meningkatkan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan dan konseling, tentang Kesehatan Reproduksi Penyiapan Berkeluarga, *Life Skill*, dan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga (3) meningkatkan kualitas lansia agar tetap produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat; serta yang ke (4) Meningkatkan peran serta perempuan untuk menambah penghasilan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif yang tergabung dalam kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Upaya-upaya pembinaan tersebut dikembangkan sesuai dengan siklus kehidupan manusia, melalui pembentukan karakter sejak dini yang penerapannya melalui pendekatan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi pembinaan terhadap balita dan anak, remaja, lansia, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pembinaan terhadap lansia dilaksanakan dalam rangka merespon lansia yang semakin hari semakin bertambah. Lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan, akan tetapi sebaliknya, penduduk lansia ini harus diberdayakan agar dapat berperan dalam pembangunan. Dalam rangka memberdayakan lansia ini maka dilakukan pendekatan program kepada keluarga yang mempunyai lansia melalui pengembangan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Kelompok Kegiatan BKL merupakan wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku/ keterampilan keluarga lansia untuk meningkatkan kualitas hidup lansia serta meningkatkan kesertaan ber-KB PUS anggota Kelompok Kegiatan. Melalui Kelompok

Kegiatan ini diharapkan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memberdayakan lansia sehingga lansia tidak lagi dipandang sebagai beban keluarga, masyarakat, dan negara. Memasuki tahun keempat dan menjelang mengakhiri RPJMN 2015 – 2019 diharapkan pencapaian program menjadi lebih baik dan perkembangan program antar wilayah menjadi lebih merata, pelaksanaan program dapat berkesinambungan dan komprehensif.

Untuk pelaksanaan program yang berkesinambungan dan komprehensif, maka perlu adanya Pemetaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia yang akan dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan di setiap tingkatan wilayah.

B. TUJUAN

Pemetaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan arah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan melalui Kelompok Kegiatan BKL.

C. METODE

Peta kerja ini disusun menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik, yaitu dengan menganalisis hasil pembaharuan Pendataan Keluarga 2015 hingga Desember 2018, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mengambil kesimpulan dan saran yang tepat.

Dalam pemetaan ini, akan digambarkan persentase keluarga lansia yang menjadi anggota BKL yang disajikan dalam bentuk tabel dan peta dengan menggunakan aplikasi Devinfo. Pada tabel akan disajikan secara rinci jumlah keluarga lansia yang menjadi anggota BKL pada masing-masing Kabupaten dan Kota. Sedangkan pada peta akan disajikan sebaran persentase keluarga lansia yang menjadi anggota BKL dalam warna-warna yang menunjukkan tinggi rendahnya persentase tersebut.

Pada pemetaan ini, data diklasifikasikan menjadi 5 kategori persentase keluarga lansia ikut BKL, yaitu sebagai berikut.

1. 0,00% – 12,49% digambarkan dengan warna merah;
2. 12,50% - 24,99% digambarkan dengan warna jingga;
3. 25,00% -37,49% digambarkan dengan warna kuning;
4. Lebih besar atau sama dengan 37,50% digambarkan dengan warna hijau; dan
5. Data bias atau tidak tersedia (*Missing data*) digambarkan dengan warna abu-abu.

D. KETERBATASAN

Data yang digunakan pada pemetaan ini berasal dari pembaharuan Pemetaan Keluarga 2015 hingga 03 Desember 2018, sehingga masih terdapat kemungkinan kekeliruan dalam proses pengumpulan dan penginputan data. Informasi pada peta kerja ini akan di *update* sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS BKKBN TAHUN 2015-2019

Renstra BKKBN mengacu pada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda ke-3 (tiga) yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran”, agenda ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, serta agenda ke-8 (delapan) yaitu “Melakukan revolusi karakter bangsa”. Dalam rangka mensukseskan agenda Nawacita tersebut, BKKBN diamanatkan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang berketahanan dan sejahtera serta memiliki jumlah anak yang ideal. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka BKKBN telah menetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2019.

Tabel 1
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan
Revisi Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015- 2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG								
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

B. RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA TAHUN 2015-2019

Untuk mendukung BKKBN dalam mencapai sasaran strategis dan sasaran Program KKBPK sebagaimana tertuang dalam revisi Rencana Strategis 2015 – 2019, telah ditetapkan sasaran Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, yaitu “Meningkatnya ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga berkualitas”, dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga berkualitas								
1.	Persentase keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	-	17,0%	16,5 %	16,0 %	15,5 %	15,0 %	15,0%
2.	Persentase remaja perempuan 15 – 19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama	9,5% (SDKI 2012)	9,45%	9,25 %	9,20 %	9,10 %	9,00 %	9,00%
3.	Median usia kawin pertama perempuan	20,1	20,6	20,7	20,8	20,9	21	21

C. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN TAHUN 2015-2019

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang disusun oleh Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (Dithanlan) mengacu pada visi, misi tujuan dan sasaran strategis BKKBN yang tertuang pada Peraturan Kepala BKKBN nomor 199 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019. Berdasarkan RPJMN maka Rencana Strategis yang telah disusun oleh Dithanlan mempunyai Program Prioritas adalah Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. Sasaran program tersebut adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga lansia dan rentan. Dithanlan sebagai salah satu komponen di Kedeputan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) memiliki Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2018 adalah “persentase keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan” dengan target capaian yaitu 9% keluarga.

Tabel 3
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pembinaan Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BKKBN
Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan								
Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan		4,3%	4,3%	5,3 %	8,0 %	9,0 %	10,0 %	10,0%
1.	Persentase Keluarga yang Memiliki Lansia Ikut BKL		8%	8%	8%	8%	8%	8%
	a. Promosi Pembinaan dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							
	b. Peningkatan Jejaring Kemitraan							
2.	Persentase PPKS yang Memberikan Pelayanan Komprehensif		30%	35%	40%	45%	50%	50%
	a. Peningkatan Kualitas PPKS							
3.	Jumlah fasilitasi pembinaan BKL dan PPKS yang berkualitas		34	34	34	34	34	34
	a. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BKL dan PPKS							

BAB III

PEMETAAN KELOMPOK KEGIATAN BKL

A. PENDATAAN KELUARGA 2015

Pendataan Keluarga (PK) 2015 terus dibaharui, hingga pada Desember 2018 jumlah keluarga yang berhasil didata secara nasional adalah 62.775.258 keluarga (96,76%) dari 64.876.530 keluarga yang ada. Hasil Pendataan Keluarga ini selanjutnya dijadikan dasar dalam membuat peta BKL di 34 provinsi hingga tingkat Kabupaten dan Kota.

B. PETA KELOMPOK KEGIATAN BKL NASIONAL

Secara Nasional, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 14.680.873 keluarga, dimana 3.130.892 keluarga atau 23,18% telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 11.549.981 keluarga belum menjadi anggota BKL. Hal ini berarti masih sekitar 76,82% sasaran yang belum menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Data Keluarga Lansia Nasional

NO	PROVINSI	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	ACEH	49.653	176.944	226.597	21,91%
2.	SUMATERA UTARA	92.867	579.206	672.073	13,82%
3.	SUMATERA BARAT	65.712	241.927	307.639	21,36%
4.	RIAU	46.125	168.163	214.288	21,52%
5.	JAMBI	24.654	127.292	151.946	16,23%
6.	SUMATERA SELATAN	87.322	256.512	343.834	25,40%
7.	BENGKULU	23.311	56.056	79.367	29,37%
8.	LAMPUNG	98.107	292.592	390.699	25,11%
9.	BANGKA BELITUNG	12.023	48.576	60.599	19,84%
10.	KEPULAUAN RIAU	8.393	42.280	50.673	16,56%
11.	DKI JAKARTA	55.792	231.562	287.354	19,42%
12.	JAWA BARAT	486.141	2.082.580	2.568.721	18,93%
13.	JAWA TENGAH	719.763	1.879.147	2.598.910	27,69%
14.	DI YOGYAKARTA	82.333	249.003	331.336	24,85%
15.	JAWA TIMUR	687.099	2.792.563	3.479.662	19,75%
16.	BANTEN	41.522	347.526	389.048	10,67%
17.	BALI	43.800	215.098	258.898	16,92%
18.	NUSA TENGGARA BARAT	30.751	227.538	258.289	11,91%
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	49.523	145.358	194.881	25,41%

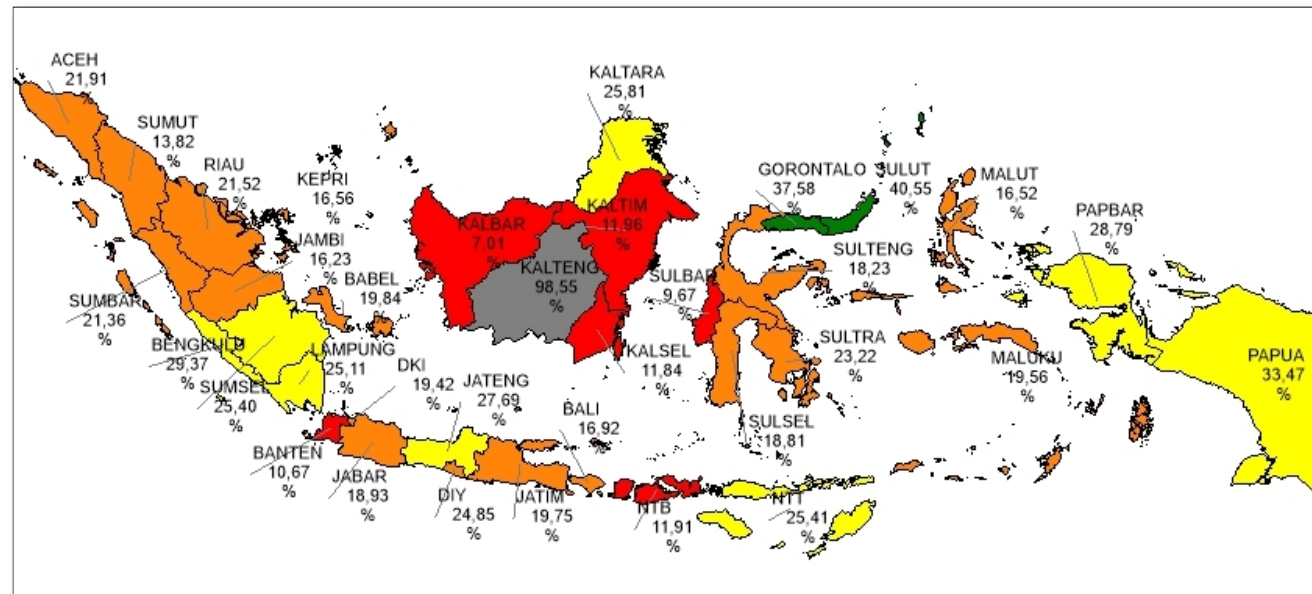
NO	PROVINSI	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
20.	KALIMANTAN BARAT	12.182	161.721	173.903	7,01%
21.	KALIMANTAN TENGAH*	93.123	1.367	94.490	98,55%
22.	KALIMANTAN SELATAN	20.104	149.634	169.738	11,84%
23.	KALIMANTAN TIMUR	13.132	96.676	109.808	11,96%
24.	KALIMANTAN UTARA	24	69	93	25,81%
25.	SULAWESI UTARA	65.153	95.520	160.673	40,55%
26.	SULAWESI TENGAH	22.779	102.176	124.955	18,23%
27.	SULAWESI SELATAN	112.896	487.239	600.135	18,81%
28.	SULAWESI TENGGARA	28.661	94.786	123.447	23,22%
29.	GORONTALO	20.518	34.083	54.601	37,58%
30.	SULAWESI BARAT	5.595	52.277	57.872	9,67%
31.	MALUKU	13.745	56.514	70.259	19,56%
32.	MALUKU UTARA	6.569	33.183	39.752	16,52%
33.	PAPUA	7.587	15.083	22.670	33,47%
34.	PAPUA BARAT	3.933	9.730	13.663	28,79%
NASIONAL		3.130.892	11.549.981	14.680.873	23,18%

*Data Bias

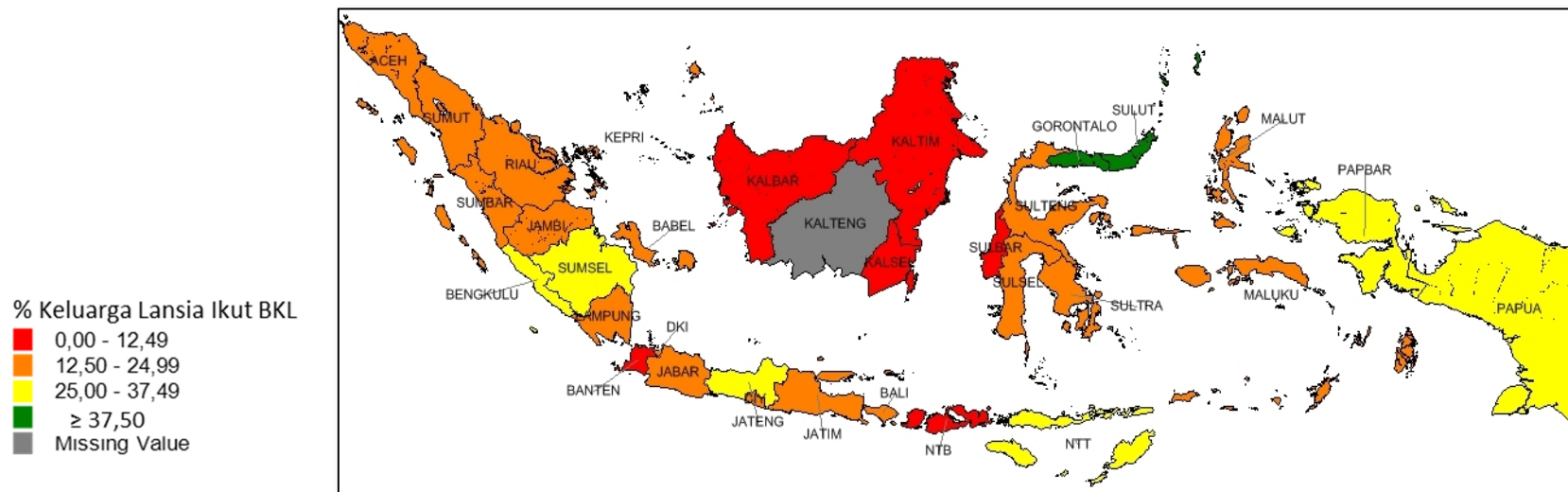
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa provinsi dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat, sedangkan persentase tertinggi adalah provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil ini juga dapat dilihat bahwa pemetaan kesertaan BKL tahun ini (2018) mengalami perubahan dengan hasil pemetaan di tahun sebelumnya (2017). Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan waktu dalam pengambilan data Pendataan Keluarga. Provinsi yang mengalami perubahan yaitu Lampung, Kalimantan Utara.

Berikut dibawah ini adalah gambaran peta di tahun 2018 dan 2017

Gambar 1 Peta Kesertaan BKL Nasional Tahun 2018



Gambar 2 Peta Kesertaan BKL Nasional Tahun 2017



C. PETA KELOMPOK KEGIATAN BKL PROVINSI

1. Provinsi Aceh

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 226.597 keluarga, dimana 49.653 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 176.944 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 21,91% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

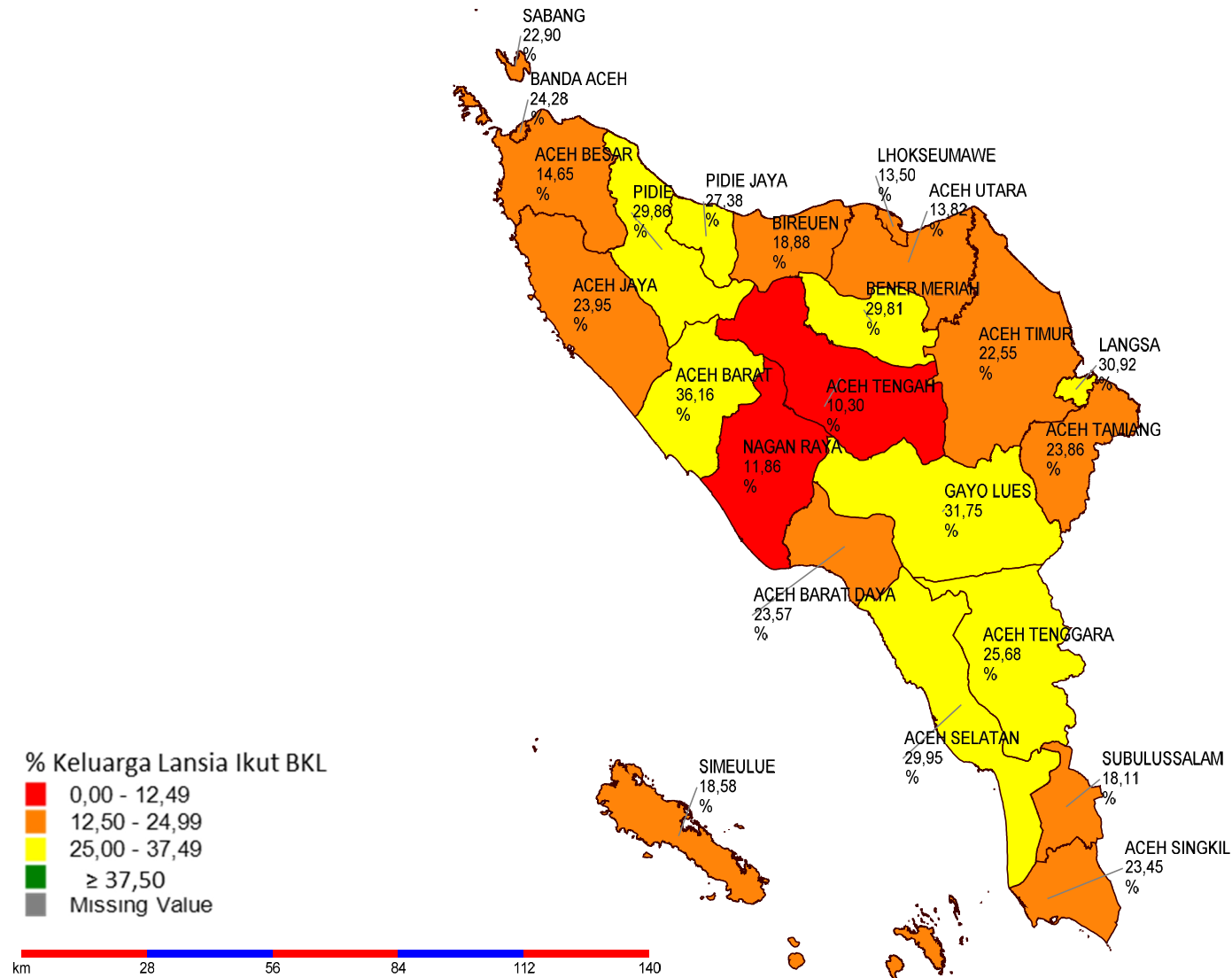
Tabel 5
Data Keluarga Lansia Provinsi Aceh

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Aceh Selatan	3.621	8.468	12.089	29,95%
2.	Aceh Tenggara	1.506	4.359	5.865	25,68%
3.	Aceh Timur	3.498	12.016	15.514	22,55%
4.	Aceh Tengah	832	7.249	8.081	10,30%
5.	Aceh Barat	2.897	5.115	8.012	36,16%
6.	Aceh Besar	2.954	17.214	20.168	14,65%
7.	Pidie	7.713	18.118	25.831	29,86%
8.	Aceh Utara	4.204	26.220	30.424	13,82%
9.	Simeulue	792	3.471	4.263	18,58%
10.	Aceh Singkil	531	1.733	2.264	23,45%
11.	Bireuen	4.317	18.550	22.867	18,88%
12.	Aceh Barat Daya	1.804	5.850	7.654	23,57%
13.	Gayo Lues	838	1.801	2.639	31,75%
14.	Aceh Jaya	1.213	3.851	5.064	23,95%
15.	Nagan Raya	677	5.030	5.707	11,86%
16.	Aceh Tamiang	2.792	8.911	11.703	23,86%
17.	Bener Meriah	1.689	3.976	5.665	29,81%
18.	Pidie Jaya	2.128	5.645	7.773	27,38%
19.	Kota Banda Aceh	1.810	5.645	7.455	24,28%
20.	Kota Sabang	453	1.525	1.978	22,90%
21.	Kota Lhokseumawe	906	5.806	6.712	13,50%
22.	Kota Langsa	2.104	4.700	6.804	30,92%
23.	Kota Subulussalam	374	1.691	2.065	18,11%
PROVINSI		49.653	176.944	226.597	21,91%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Aceh Tengah (10,30%), sedangkan persentase tertinggi adalah Aceh Barat (36,16%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 3 Peta Kesertaan BKL Provinsi Aceh



2. Provinsi Sumatera Utara

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 672.073 keluarga, dimana 92.867 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 579.206 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 13,82% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL. Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Data Keluarga Lansia Provinsi Sumatera Utara

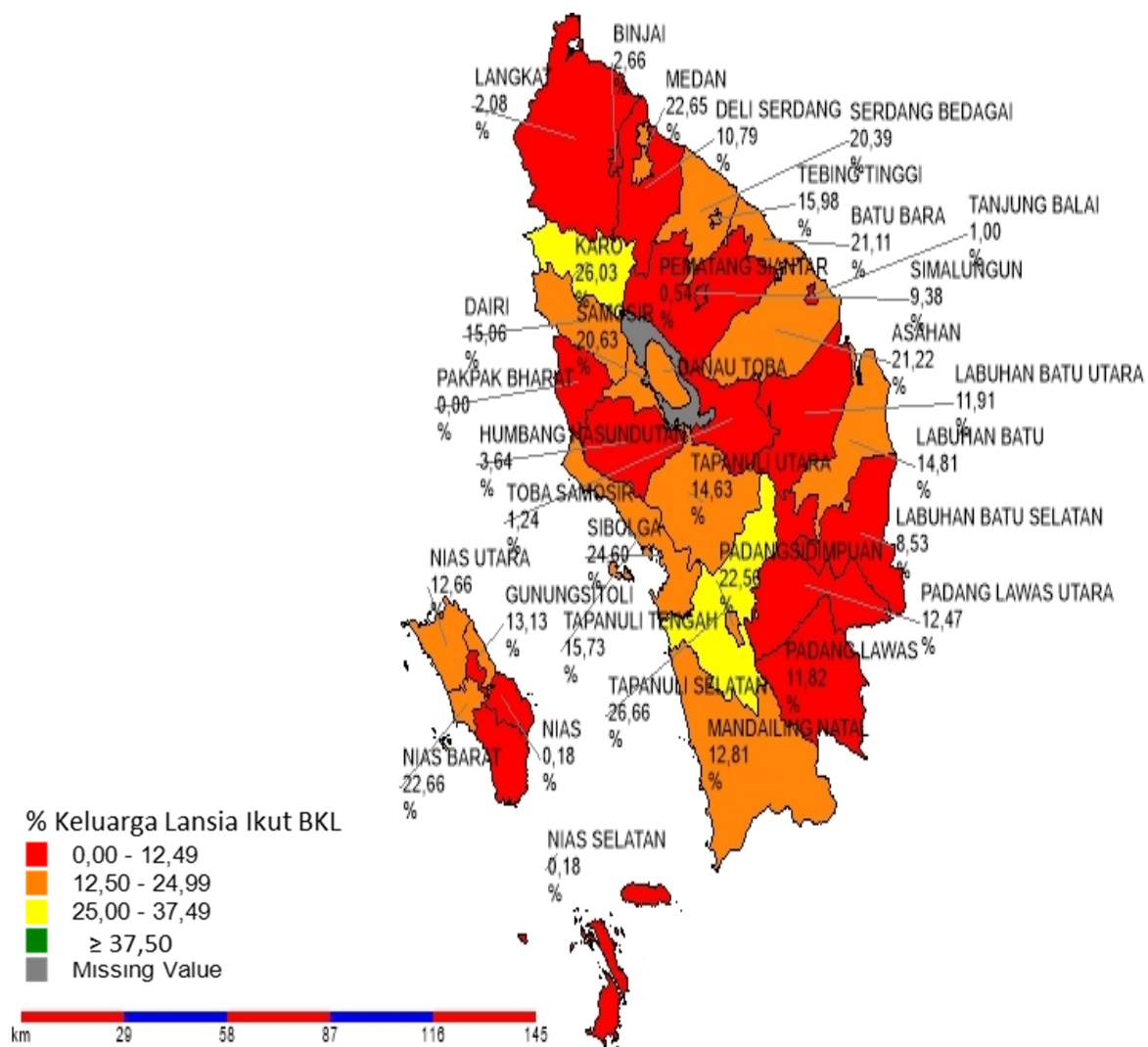
NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Tapanuli Tengah	2.450	13.124	15.574	15,73%
2.	Tapanuli Utara	2.569	14.994	17.563	14,63%
3.	Tapanuli Selatan	3.951	10.869	14.820	26,66%
4.	Nias	10	5.700	5.710	0,18%
5.	Langkat	1.289	60.615	61.904	2,08%
6.	Karo	4.455	12.658	17.113	26,03%
7.	Deli Serdang	9.531	78.769	88.300	10,79%
8.	Simalungun	4.885	47.187	52.072	9,38%
9.	Asahan	7.454	27.666	35.120	21,22%
10.	Labuhan Batu	2.353	13.534	15.887	14,81%
11.	Dairi	2.400	13.537	15.937	15,06%
12.	Toba Samosir	152	12.139	12.291	1,24%
13.	Mandailing Natal	2.516	17.120	19.636	12,81%
14.	Nias Selatan	1.141	9.232	10.373	11,00%
15.	Pakpak Bharat	0	1.919	1.919	0,00%
16.	Humbang Hasundutan	477	12.626	13.103	3,64%
17.	Samosir	1.880	7.231	9.111	20,63%
18.	Serdang Bedagai	5.458	21.311	26.769	20,39%
19.	Batubara	4.072	15.214	19.286	21,11%
20.	Padang Lawas Utara	762	5.349	6.111	12,47%
21.	Padang Lawas	1.004	7.490	8.494	11,82%
22.	Labuhan Batu Selatan	1.016	10.897	11.913	8,53%
23.	Labuhan Batu Utara	1.583	11.706	13.289	11,91%
24.	Nias Utara	641	4.424	5.065	12,66%
25.	Nias Barat	768	2.621	3.389	22,66%
26.	Kota Medan	23.964	81.849	105.813	22,65%
27.	Kota Pematang Siantar	76	14.087	14.163	0,54%
28.	Kota Sibolga	1.036	3.176	4.212	24,60%
29.	Kota Tanjung Balai	72	7.121	7.193	1,00%
30.	Kota Binjai	399	14.621	15.020	2,66%

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
31.	Kota Tebing Tinggi	1.514	7.959	9.473	15,98%
32.	Kota Padang Sidempuan	2.298	7.889	10.187	22,56%
33.	Kota Gunung Sitoli	691	4.572	5.263	13,13%
PROVINSI		92.867	579.206	672.073	13,82%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah yaitu Pakpak Barat (0%), Kabupaten Nias (0,18%). Sedangkan persentase tertinggi adalah Tapanuli Selatan (26,66%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 4 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sumatera Utara



3. Provinsi Sumatera Barat

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 307.639 keluarga, dimana 65.712 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 241.927 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 21.36% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

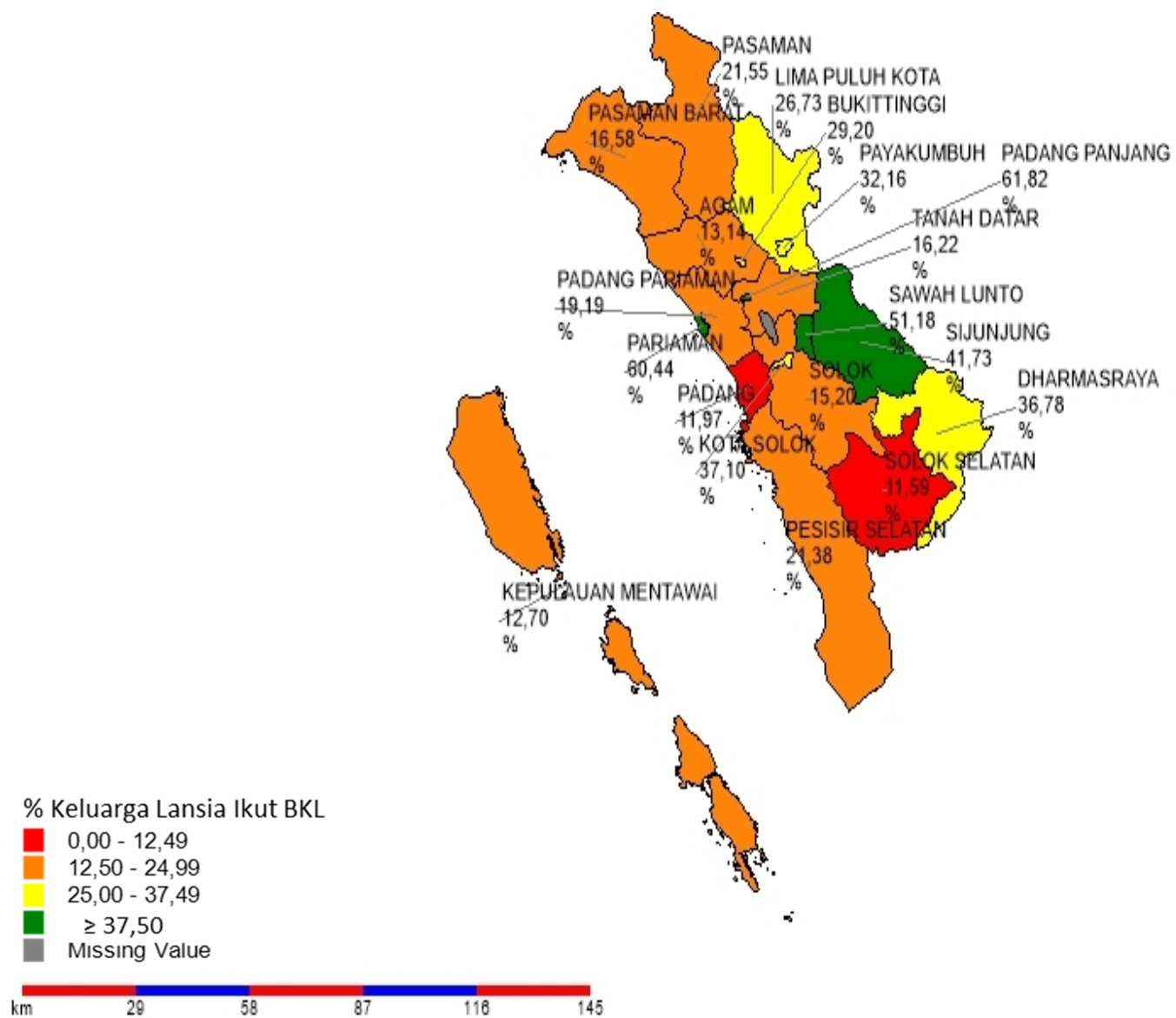
Tabel 7
Data Keluarga Lansia Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Pesisir Selatan	6.151	22.616	28.767	21,38%
2.	Solok	3.356	18.719	22.075	15,20%
3.	Sijunjung	5.155	7.199	12.354	41,73%
4.	Tanah Datar	4.860	25.112	29.972	16,22%
5.	Padang Pariaman	5.757	24.240	29.997	19,19%
6.	Agam	4.894	32.359	37.253	13,14%
7.	Lima Puluh Koto	7.698	21.100	28.798	26,73%
8.	Pasaman	3.079	11.207	14.286	21,55%
9.	Kepulauan Mentawai	320	2.200	2.520	12,70%
10.	Dharmasraya	3.368	5.788	9.156	36,78%
11.	Solok Selatan	852	6.499	7.351	11,59%
12.	Pasaman Barat	2.572	12.937	15.509	16,58%
13.	Kota Padang	4.708	34.612	39.320	11,97%
14.	Kota Solok	1.254	2.126	3.380	37,10%
15.	Kota Sawah Lunto	1.950	1.860	3.810	51,18%
16.	Kota Padang Panjang	1.864	1.151	3.015	61,82%
17.	Kota Bukittinggi	1.955	4.740	6.695	29,20%
18.	Kota Payakumbuh	2.466	5.202	7.668	32,16%
19.	Kota Pariaman	3.453	2.260	5.713	60,44%
PROVINSI		65.712	241.927	307.639	21,36%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Solok Selatan (11,59%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Padang Panjang (61,82%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini

Gambar 5 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sumatera Barat



4. Provinsi Riau

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 214.288 keluarga, dimana 46.125 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 168.163 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 21,52% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

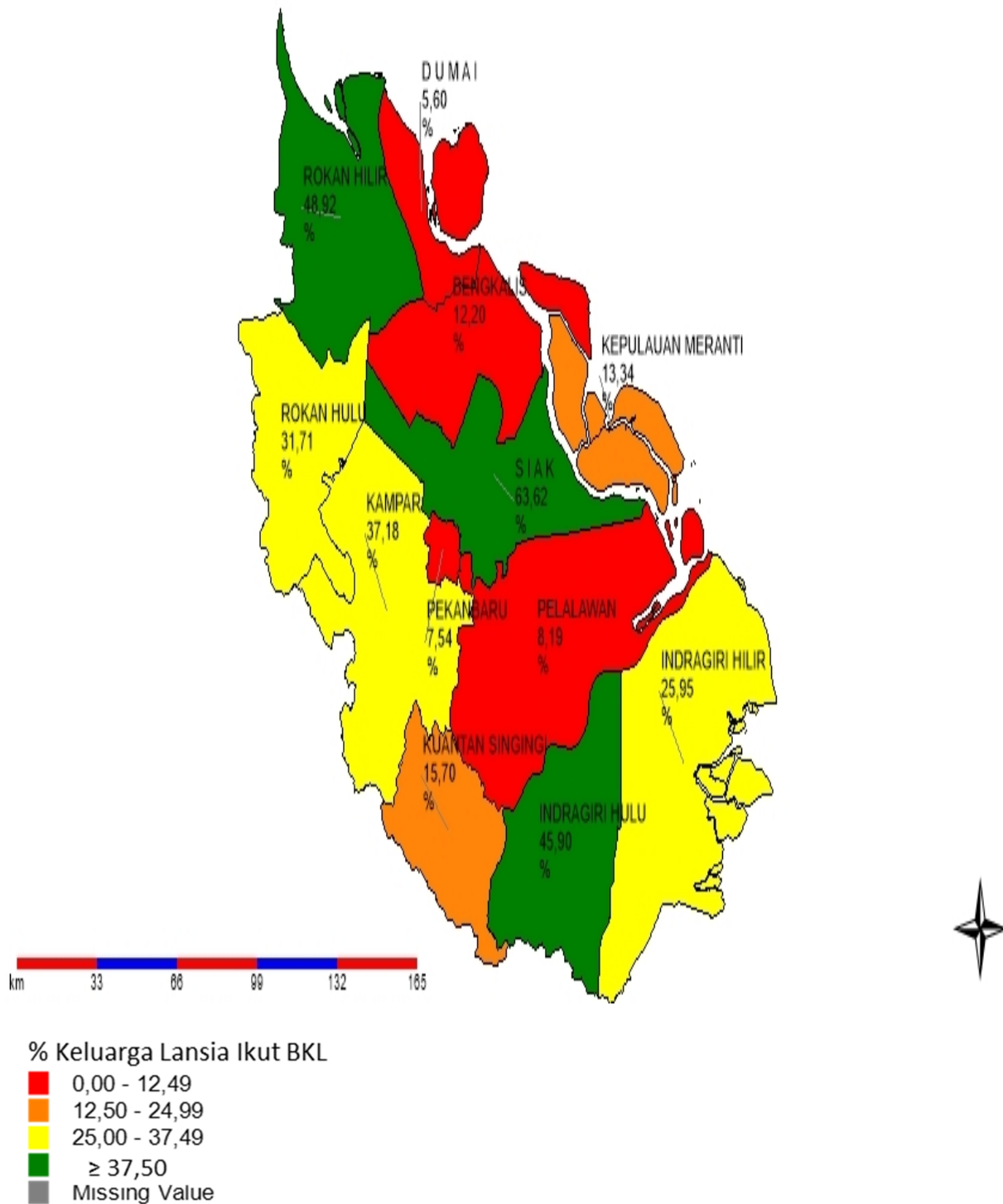
Tabel 8
Data Keluarga Lansia Provinsi Riau

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kampar	8.337	14.085	22.422	37,18%
2.	Indragiri Hulu	5.124	6.040	11.164	45,90%
3.	Bengkalis	3.732	26.863	30.595	12,20%
4.	Indragiri Hilir	4.656	13.285	17.941	25,95%
5.	Pelalawan	951	10.656	11.607	8,19%
6.	Rokan Hulu	3.224	6.944	10.168	31,71%
7.	Rokan Hilir	5.347	5.584	10.931	48,92%
8.	Siak	5.848	3.344	9.192	63,62%
9.	Kuantan Singingi	3.081	16.549	19.630	15,70%
10.	Kepulauan Meranti	1.712	11.121	12.833	13,34%
11.	Kota Pekanbaru	3.410	41.832	45.242	7,54%
12.	Kota Dumai	703	11.860	12.563	5,60%
PROVINSI		46.125	168.163	214.288	21,52%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Dumai (5,60%), sedangkan persentase tertinggi adalah Siak (63,62%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 6 Peta Kesertaan BKL Provinsi Riau



5. Provinsi Jambi

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 151.946 keluarga, dimana 24.654 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 127.292 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 16,23% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

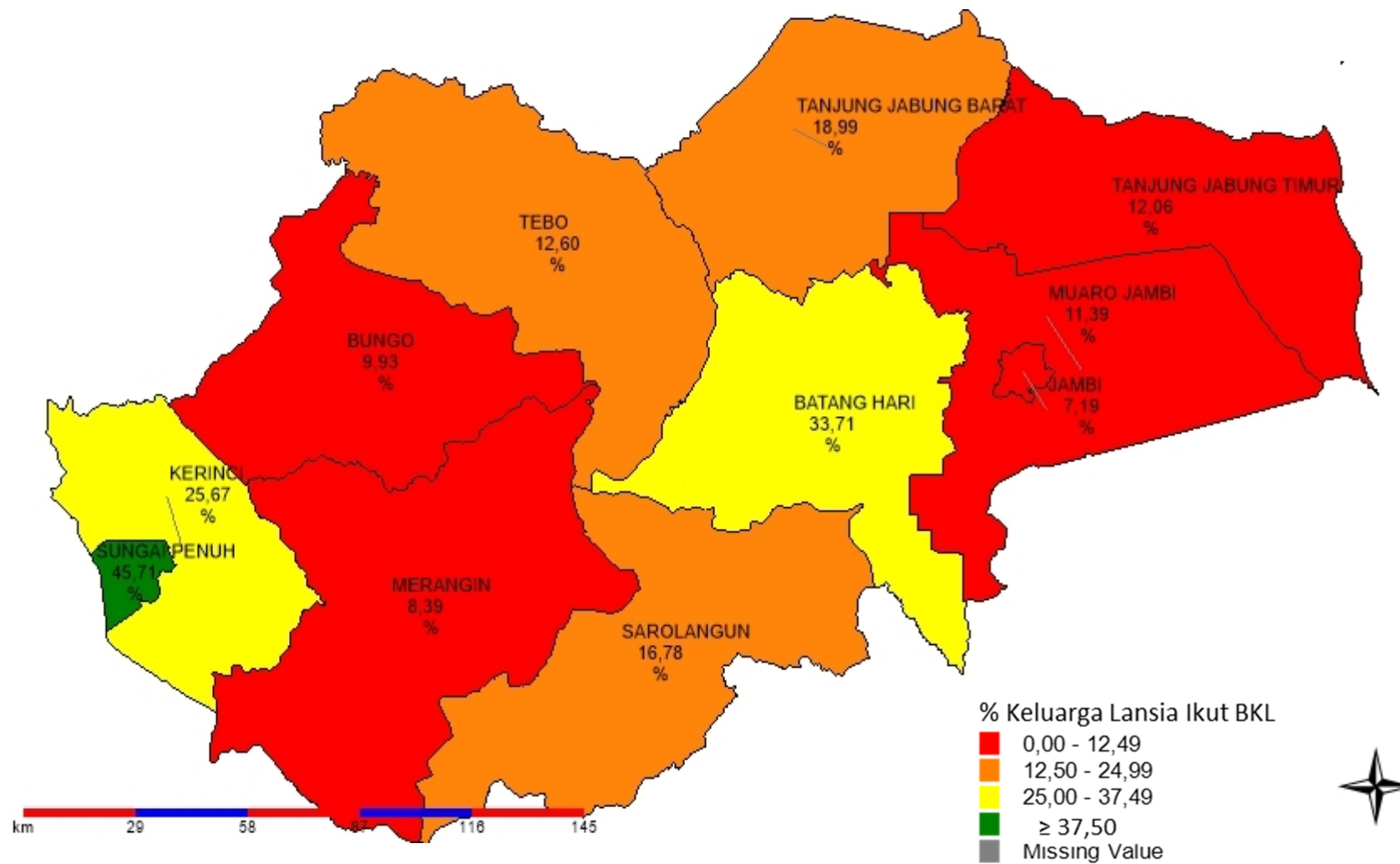
Tabel 9
Data Keluarga Lansia Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kerinci	4.587	13.285	17.872	25,67%
2.	Merangin	1.289	14.077	15.366	8,39%
3.	Sarolangun	1.746	8.659	10.405	16,78%
4.	Batang Hari	3.949	7.765	11.714	33,71%
5.	Muaro Jambi	1.646	12.810	14.456	11,39%
6.	Tanjung Jabung Barat	1.417	10.333	11.750	12,06%
7.	Tanjung Jabung Timur	2.485	10.599	13.084	18,99%
8.	Bungo	1.269	11.514	12.783	9,93%
9.	Tebo	1.781	12.355	14.136	12,60%
10.	Kota Jambi	1.755	22.653	24.408	7,19%
11.	Sungai Penuh	2.730	3.242	5.972	45,71%
PROVINSI		24.654	127.292	151.946	16,23%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Jambi (7,19%), sedangkan persentase tertinggi adalah Sungai Penuh (45,71%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 7 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jambi



6. Provinsi Sumatera Selatan

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 343.834 keluarga, dimana 87.322 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 256.512 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 25,40% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

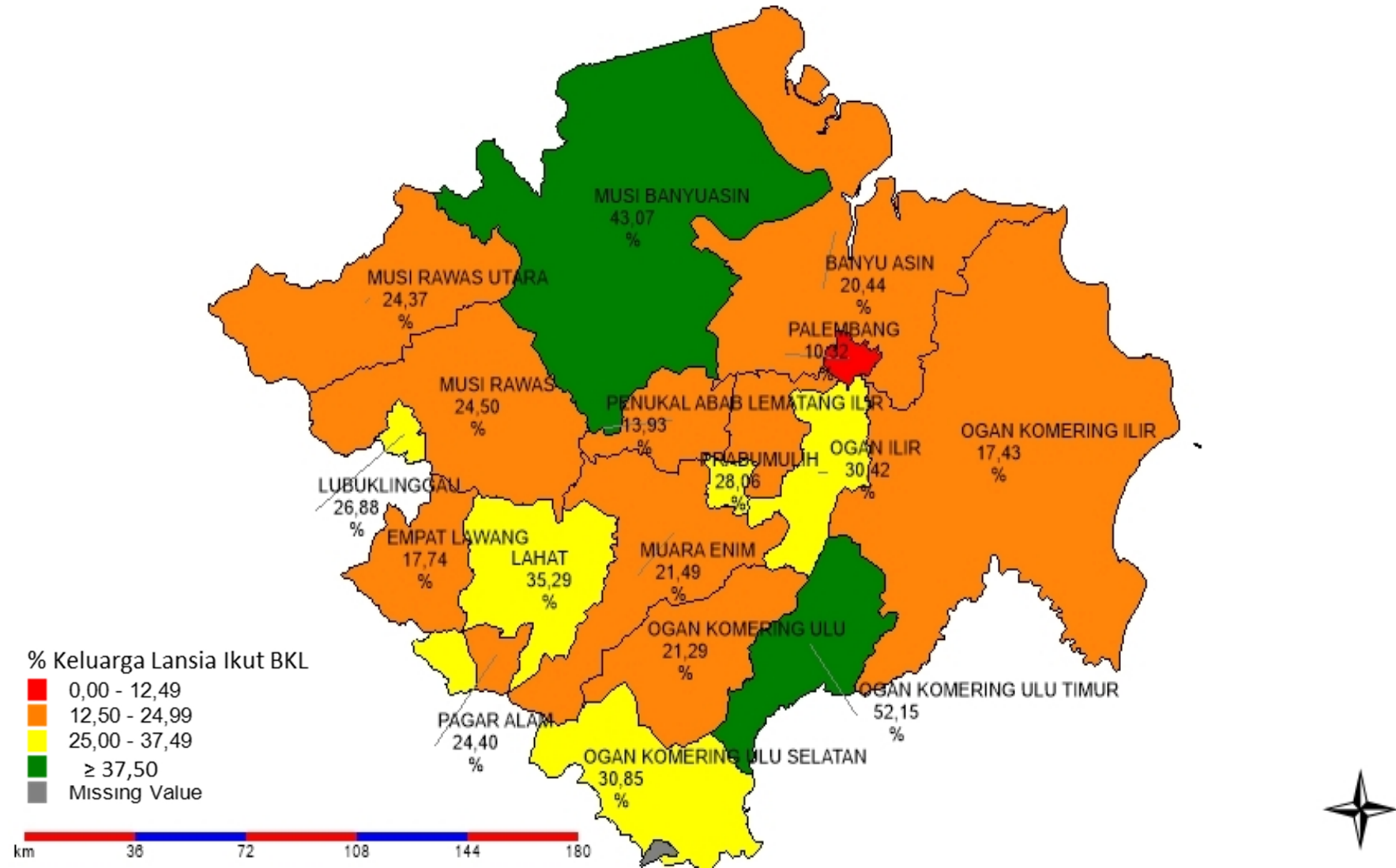
Tabel 10
Data Keluarga Lansia Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Ogan Komering Ulu	2.695	9.961	12.656	21,29%
2.	Ogan Komering Ilir	5.365	25.424	30.789	17,43%
3.	Muara Enim	5.323	19.451	24.774	21,49%
4.	Lahat	7.802	14.306	22.108	35,29%
5.	Musi Rawas	5.241	16.150	21.391	24,50%
6.	Musi Banyuasin	9.200	12.159	21.359	43,07%
7.	Banyuasin	6.553	25.513	32.066	20,44%
8.	Ogan Komering Ulu Timur	19.457	17.851	37.308	52,15%
9.	Ogan Komering Ulu Selatan	3.474	7.787	11.261	30,85%
10.	Ogan Ilir	5.177	11.841	17.018	30,42%
11.	Empat Lawang	1.926	8.930	10.856	17,74%
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	961	5.940	6.901	13,93%
13.	Musi Rawas Utara	1.358	4.214	5.572	24,37%
14.	Kota Palembang	7.002	60.823	67.825	10,32%
15.	Kota Pagar Alam	1.895	5.871	7.766	24,40%
16.	Kota Lubuk Linggau	1.983	5.393	7.376	26,88%
17.	Kota Prabumulih	1.910	4.898	6.808	28,06%
PROVINSI		87.322	256.512	343.834	25,40%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Palembang (10,32%), sedangkan persentase tertinggi adalah Ogan Komering Ulu Timur (52,15%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 8 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sumatera Selatan



7. Provinsi Bengkulu

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 79.367 keluarga, dimana 23.311 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 56.056 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 29,37% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

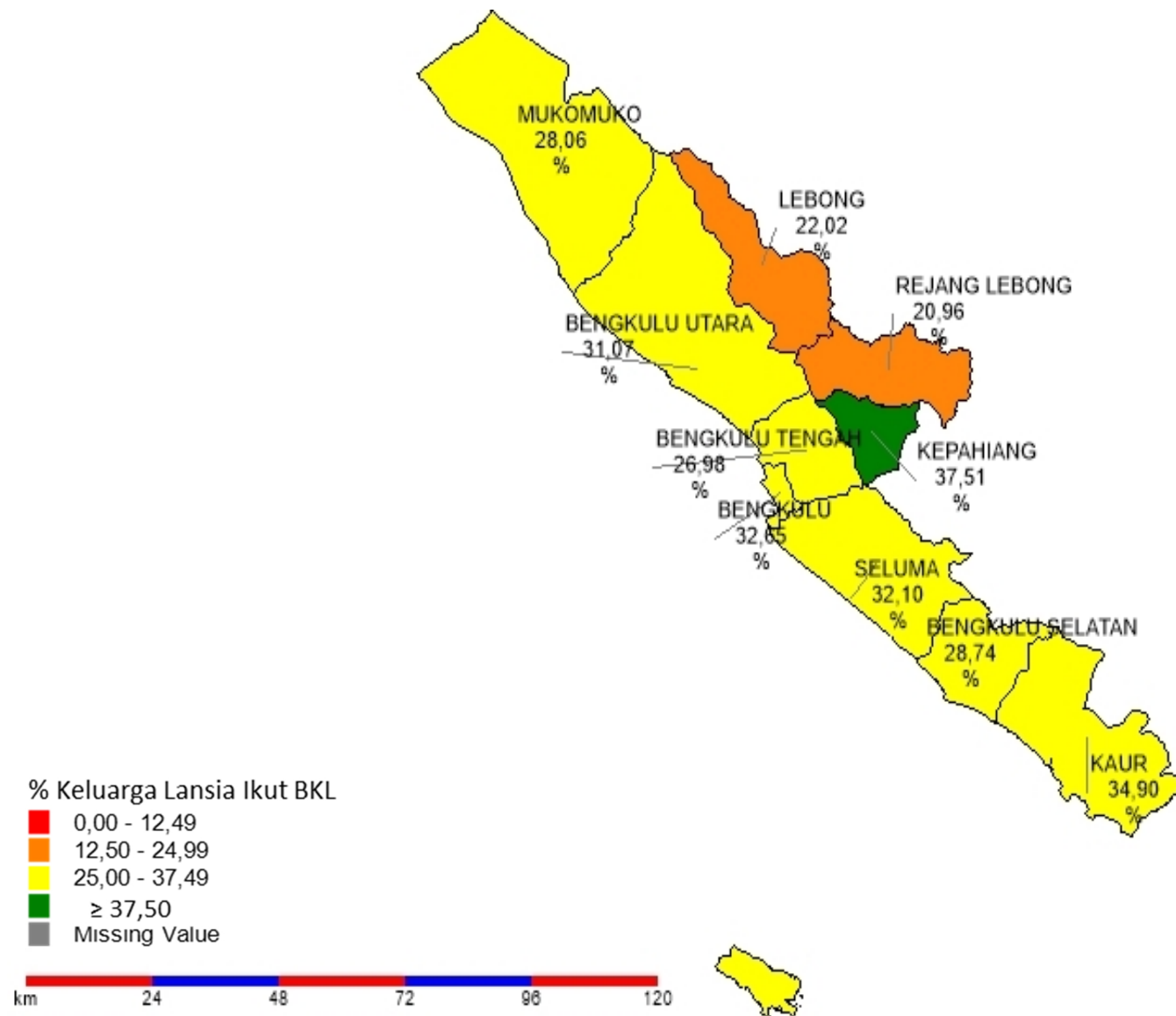
Tabel 11
Data Keluarga Lansia Provinsi Bengkulu

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Bengkulu Selatan	2.279	5.650	7.929	28,74%
2.	Rejang Lebong	2.287	8.625	10.912	20,96%
3.	Bengkulu Utara	4.102	9.101	13.203	31,07%
4.	Kaur	1.757	3.277	5.034	34,90%
5.	Seluma	2.834	5.994	8.828	32,10%
6.	Muko-Muko	2.133	5.468	7.601	28,06%
7.	Lebong	1.140	4.037	5.177	22,02%
8.	Kepahiang	2.130	3.548	5.678	37,51%
9.	Bengkulu Tengah	1.192	3.226	4.418	26,98%
10.	Kota Bengkulu	3.457	7.130	10.587	32,65%
PROVINSI		23.311	56.056	79.367	29,37%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Rejang Lebong (20,96%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kepahiang (37,51%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 9 Peta Kesertaan BKL Provinsi Bengkulu



8. Provinsi Lampung

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 390.699 keluarga, dimana 98.107 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 292.592 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 25,11% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

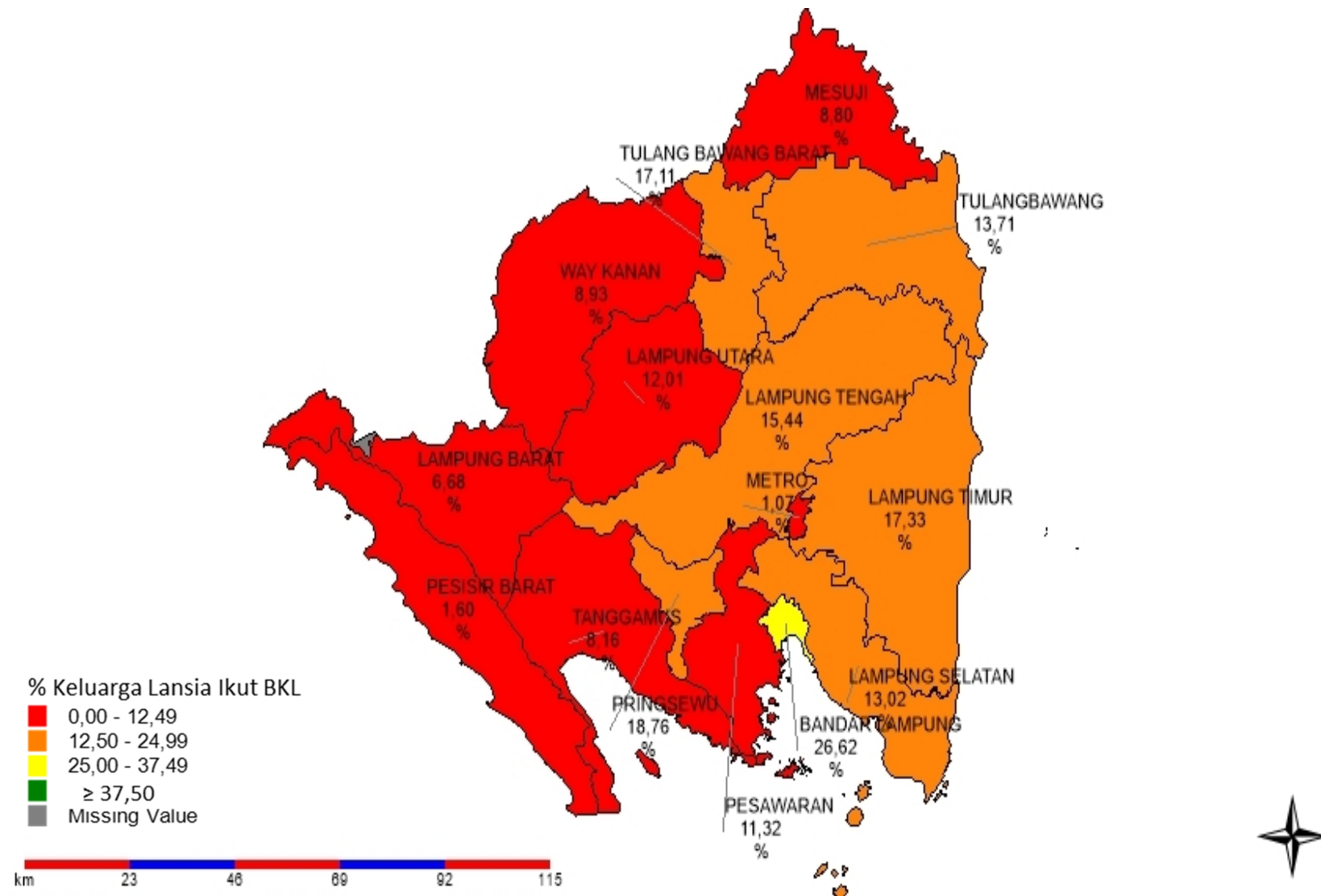
Tabel 12
Data Keluarga Lansia Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Lampung Selatan	13.998	39.009	107.536	13,02%
2.	Lampung Tengah	12.905	41.624	83.605	15,44%
3.	Lampung Utara	4.815	24.261	40.093	12,01%
4.	Lampung Barat	1.793	9.224	26.830	6,68%
5.	Tulang Bawang	6.007	9.806	43.800	13,71%
6.	Tanggamus	6.008	21.979	73.586	8,16%
7.	Lampung Timur	11.697	33.902	67.514	17,33%
8.	Way Kanan	4.036	17.879	45.217	8,93%
9.	Pesawaran	5.332	17.970	47.093	11,32%
10.	Pringsewu	6.311	17.480	33.639	18,76%
11.	Mesuji	2.014	7.834	22.888	8,80%
12.	Tulang Bawang Barat	3.327	9.713	19.448	17,11%
13.	Pesisir Barat	852	5.556	53.130	1,60%
14.	Kota Bandar Lampung	14.740	31.982	55.367	26,62%
15.	Kota Metro	4.272	4.373	399.344	1,07%
PROVINSI		98.107	292.592	390.699	25,11%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Pesisir Barat (1,60%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Bandar Lampung (26,62%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 10 Peta Kesertaan BKL Provinsi Lampung



9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 60.599 keluarga, dimana 12.023 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 48.576 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 19,84% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

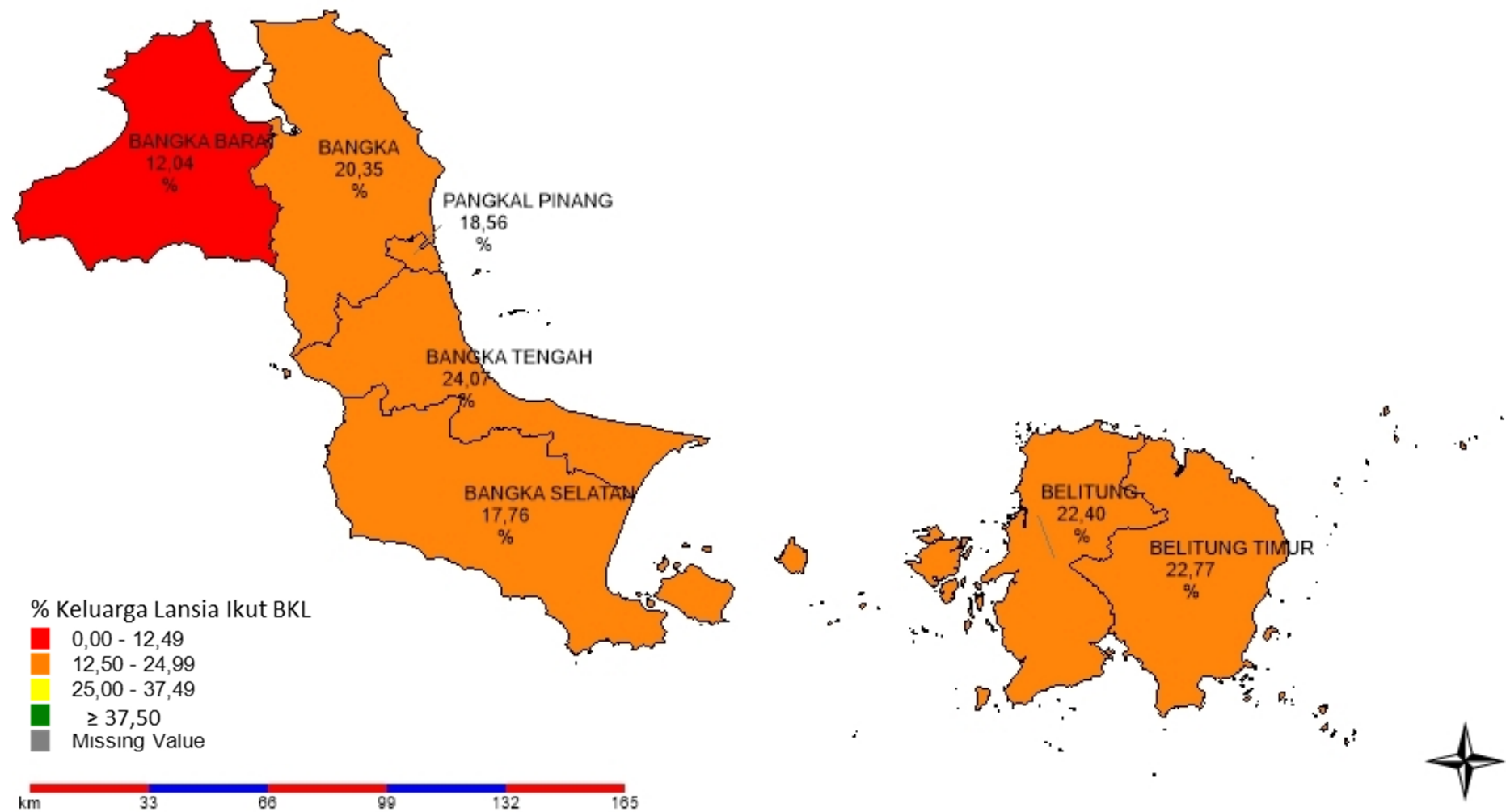
Tabel 13
Data Keluarga Lansia Provinsi Bangka Belitung

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Bangka	3.502	13.710	17.212	20,35%
2.	Belitung	1.832	6.348	8.180	22,40%
3.	Bangka Selatan	1.027	4.757	5.784	17,76%
4.	Bangka Tengah	1.539	4.855	6.394	24,07%
5.	Bangka Barat	809	5.909	6.718	12,04%
6.	Belitung Timur	1.550	5.258	6.808	22,77%
7.	Kota Pangkal Pinang	1.764	7.739	9.503	18,56%
PROVINSI		12.023	48.576	60.599	19,84%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Bangka Barat (12,04%), sedangkan persentase tertinggi adalah Bangka Tengah (24,07%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 11 Peta Kesertaan BKL Provinsi Bangka Belitung



10. Provinsi Kepulauan Riau

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 50.673 keluarga, dimana 8.393 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 42.280 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 16,56% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

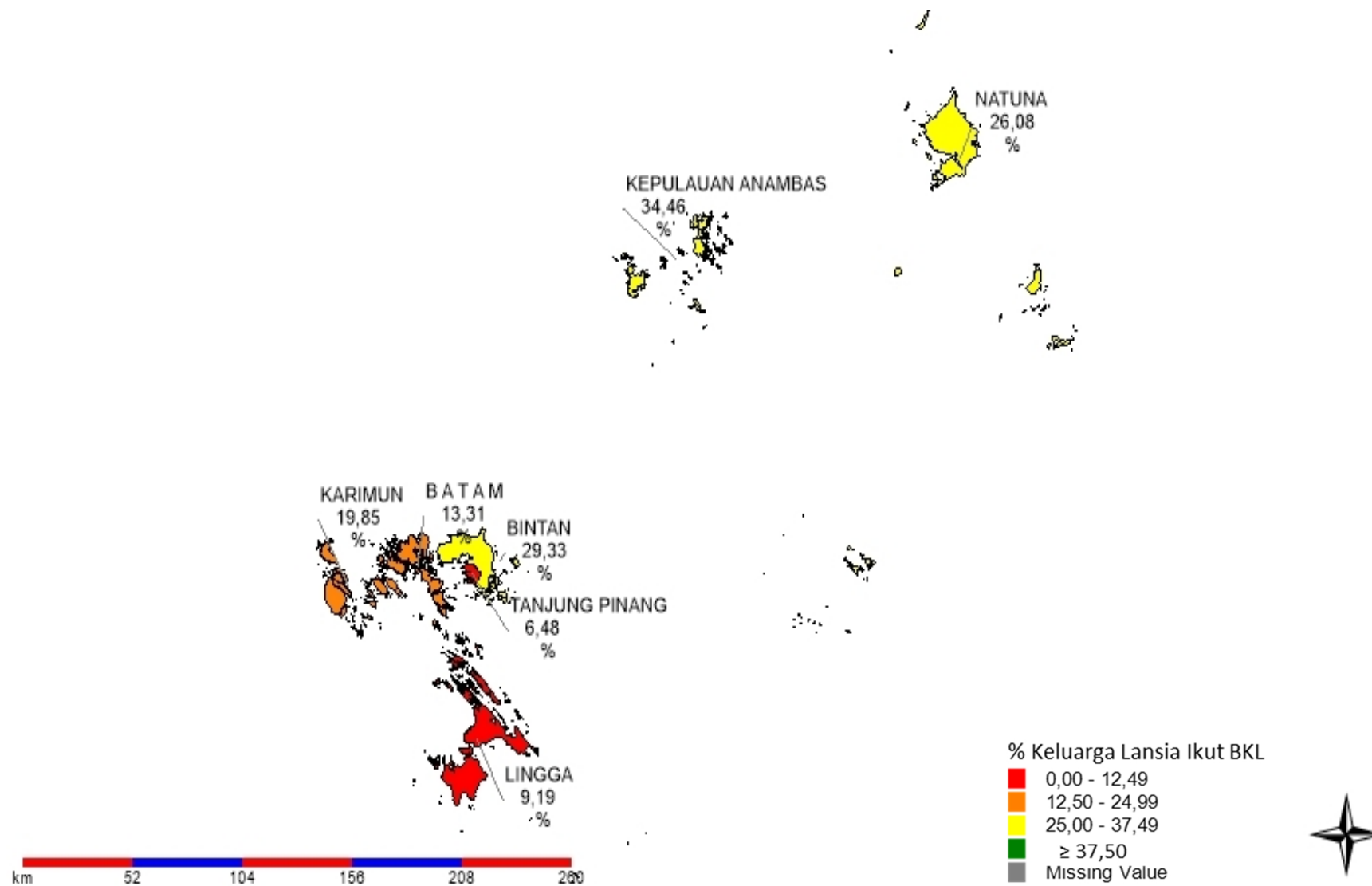
Tabel 14
Data Keluarga Lansia Provinsi Kepulauan Riau

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Bintan	1.748	4.212	5.960	29,33%
2.	Karimun	2.163	8.734	10.897	19,85%
3.	Natuna	778	2.205	2.983	26,08%
4.	Lingga	572	5.649	6.221	9,19%
5.	Kepulauan Anambas	836	1.590	2.426	34,46%
6.	Kota Batam	1.672	10.889	12.561	13,31%
7.	Kota Tanjung Pinang	624	9.001	9.625	6,48%
PROVINSI		8.393	42.280	50.673	16,56%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Tanjung Pinang (6,48%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kepulauan Anambas (34,46%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 12 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kepulauan Riau



11. Provinsi DKI Jakarta

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 287.354 keluarga, dimana 55.792 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 231.562 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 19,42% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

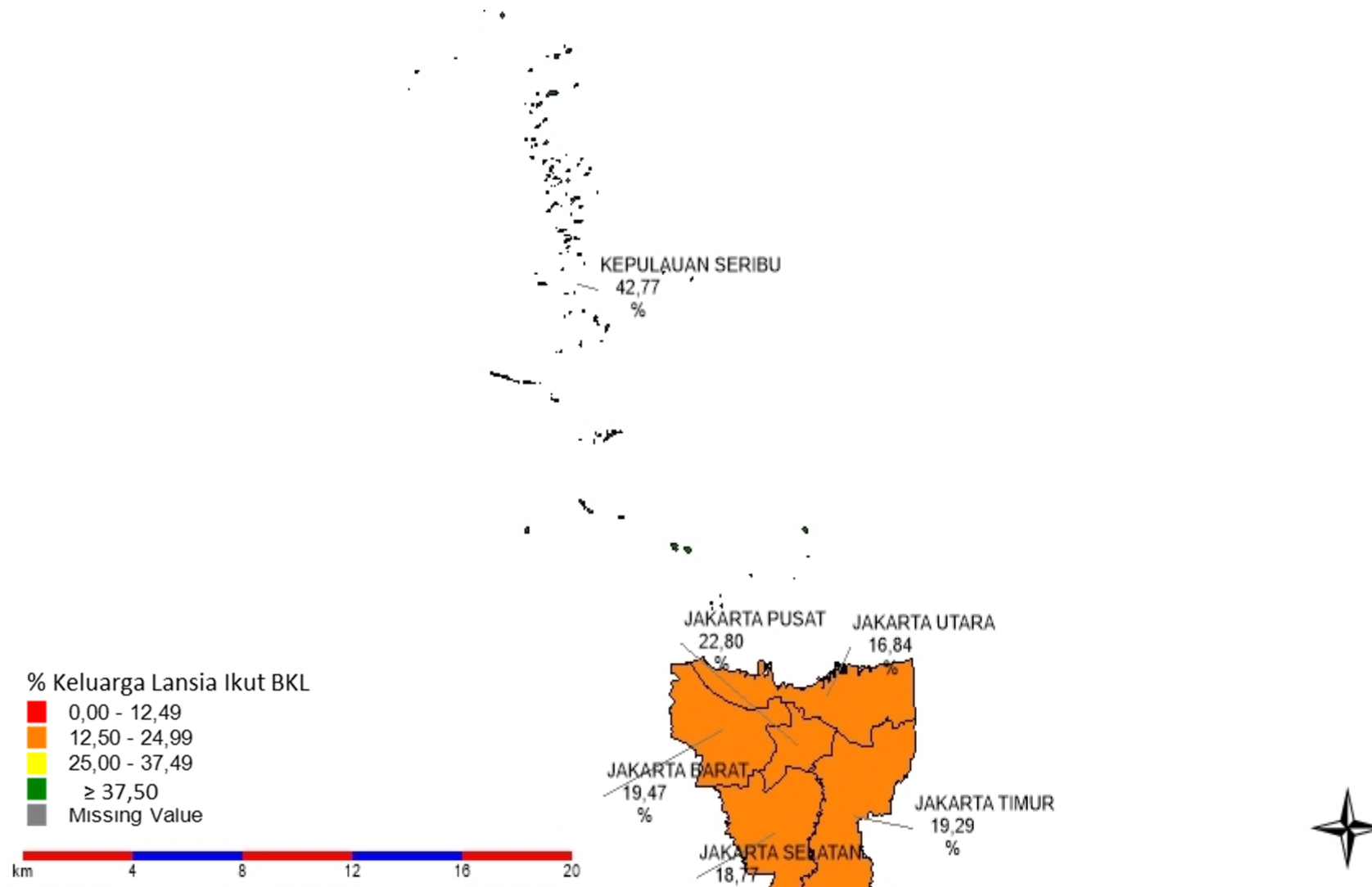
Tabel 15
Data Keluarga Lansia Provinsi DKI Jakarta

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kepulauan Seribu	340	455	795	42,77%
2.	Jakarta Pusat	9.394	31.816	41.210	22,80%
3.	Jakarta Utara	7.358	36.334	43.692	16,84%
4.	Jakarta Barat	11.814	48.865	60.679	19,47%
5.	Jakarta Selatan	11.256	48.704	59.960	18,77%
6.	Jakarta Timur	15.630	65.388	81.018	19,29%
PROVINSI		55.792	231.562	287.354	19,42%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Jakarta Utara (16,84%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kepulauan Seribu (42,77%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 13 Peta Kesertaan BKL Provinsi DKI Jakarta



12. Provinsi Jawa Barat

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 2.568.721 keluarga, dimana 486.141 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 2.082.580 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 18,93% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

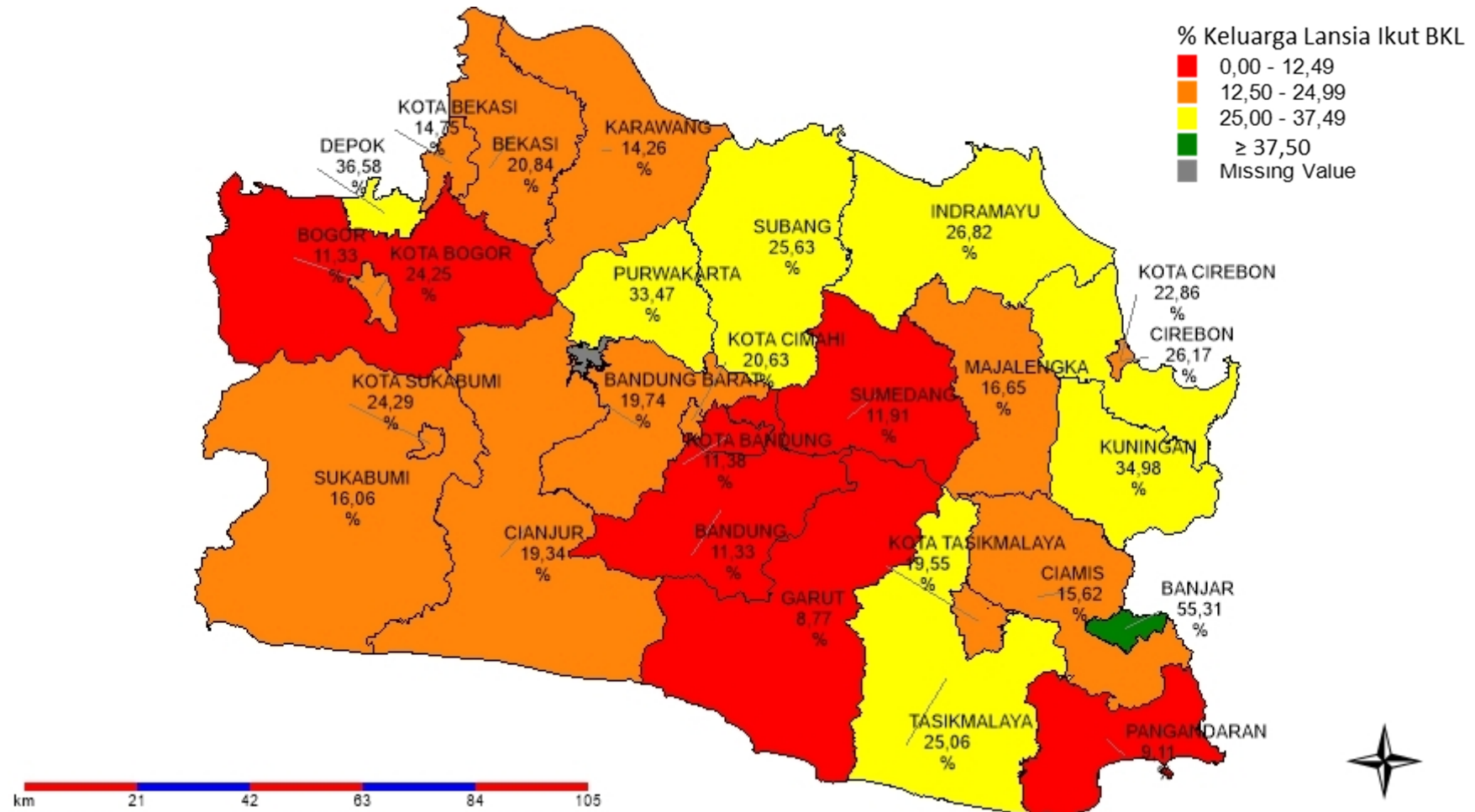
Tabel 16
Data Keluarga Lansia Provinsi Jawa Barat

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Bogor	22.887	179.168	202.055	11,33%
2.	Sukabumi	24.891	130.125	155.016	16,06%
3.	Cianjur	28.435	118.557	146.992	19,34%
4.	Bandung	18.406	143.983	162.389	11,33%
5.	Garut	12.589	131.020	143.609	8,77%
6.	Tasikmalaya	36.834	110.135	146.969	25,06%
7.	Ciamis	19.606	105.931	125.537	15,62%
8.	Kuningan	32.027	59.534	91.561	34,98%
9.	Cirebon	29.651	83.656	113.307	26,17%
10.	Majalengka	17.080	85.517	102.597	16,65%
11.	Sumedang	13.089	96.784	109.873	11,91%
12.	Indramayu	26.611	72.611	99.222	26,82%
13.	Subang	28.659	83.155	111.814	25,63%
14.	Purwakarta	17.311	34.413	51.724	33,47%
15.	Karawang	15.519	93.312	108.831	14,26%
16.	Bekasi	22.245	84.491	106.736	20,84%
17.	Bandung Barat	21.199	86.180	107.379	19,74%
18.	Pangandaran	3.247	32.380	35.627	9,11%
19.	Kota Bogor	12.990	40.571	53.561	24,25%
20.	Kota Sukabumi	4.698	14.641	19.339	24,29%
21.	Kota Bandung	13.554	105.504	119.058	11,38%
22.	Kota Cirebon	5.193	17.522	22.715	22,86%
23.	Kota Bekasi	11.597	67.045	78.642	14,75%
24.	Kota Depok	24.318	42.160	66.478	36,58%
25.	Kota Cimahi	5.868	22.572	28.440	20,63%
26.	Kota Tasikmalaya	8.272	34.046	42.318	19,55%
27.	Kota Banjar	9.365	7.567	16.932	55,31%
PROVINSI		486.141	2.082.580	2.568.721	18,93%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Garut (8,77%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Banjar (55,31%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 14 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jawa Barat



13. Provinsi Jawa Tengah

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 2.598.910 keluarga, dimana 719.763 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 1.879.147 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 27,69% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Data Keluarga Lansia Provinsi Jawa Tengah

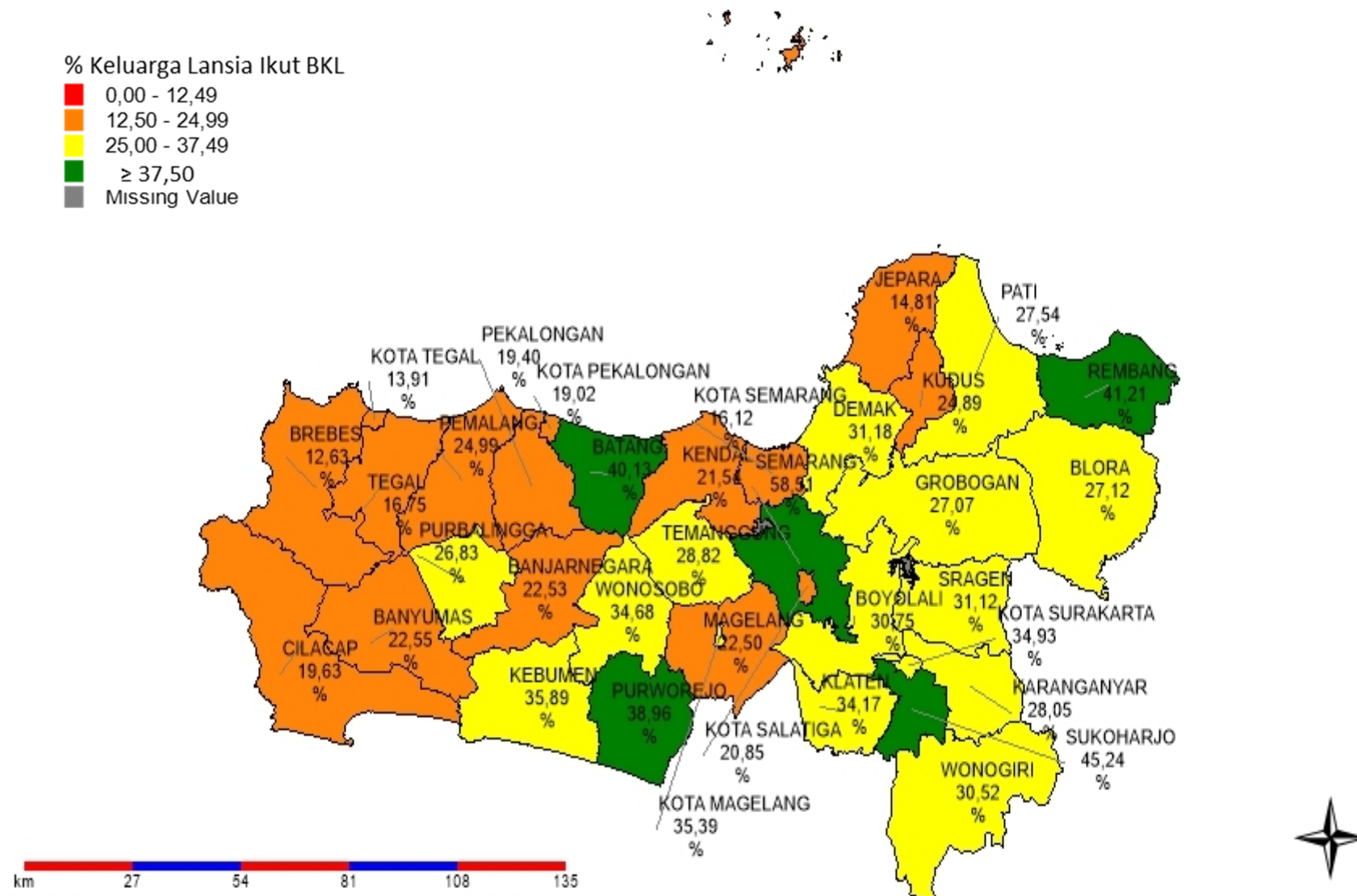
NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Cilacap	28.617	117.187	145.804	19,63%
2.	Banyumas	26.606	91.381	117.987	22,55%
3.	Purbalingga	18.395	50.163	68.558	26,83%
4.	Banjarnegara	14.700	50.537	65.237	22,53%
5.	Kebumen	39.225	70.074	109.299	35,89%
6.	Purworejo	28.381	44.463	72.844	38,96%
7.	Wonosobo	21.950	41.342	63.292	34,68%
8.	Magelang	23.020	79.293	102.313	22,50%
9.	Boyolali	27.112	61.058	88.170	30,75%
10.	Klaten	38.367	73.919	112.286	34,17%
11.	Sukoharjo	29.698	35.947	65.645	45,24%
12.	Wonogiri	36.436	82.938	119.374	30,52%
13.	Karanganyar	20.937	53.715	74.652	28,05%
14.	Sragen	25.925	57.388	83.313	31,12%
15.	Grobogan	29.514	79.500	109.014	27,07%
16.	Blora	20.652	55.494	76.146	27,12%
17.	Rembang	18.667	26.625	45.292	41,21%
18.	Pati	30.066	79.111	109.177	27,54%
19.	Kudus	12.165	36.702	48.867	24,89%
20.	Jepara	11.403	65.617	77.020	14,81%
21.	Demak	20.771	45.844	66.615	31,18%
22.	Kab. Semarang	44.293	31.407	75.700	58,51%
23.	Temanggung	17.396	42.968	60.364	28,82%
24.	Kendal	13.770	50.168	63.938	21,54%
25.	Batang	20.741	30.948	51.689	40,13%
26.	Pekalongan	12.695	52.753	65.448	19,40%
27.	Pemalang	23.595	70.822	94.417	24,99%
28.	Tegal	14.598	72.545	87.143	16,75%
29.	Brebes	13.546	93.697	107.243	12,63%
30.	Kota Magelang	3.508	6.404	9.912	35,39%

NO.	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
31.	Kota Surakarta	11.736	21.861	33.597	34,93%
32.	Kota Salatiga	2.308	8.763	11.071	20,85%
33.	Kota Semarang	13.090	68.097	81.187	16,12%
34.	Kota Pekalongan	3.093	13.172	16.265	19,02%
35.	Kota Tegal	2.787	17.244	20.031	13,91%
PROVINSI		719.763	1.879.147	2.598.910	27,69%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Brebes (12,63%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kabupaten Semarang (58,51%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut in

Gambar 15 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jawa Tengah



14. Provinsi D.I. Yogyakarta

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 331.336 keluarga, dimana 82.333 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 249.003 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 24,85% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

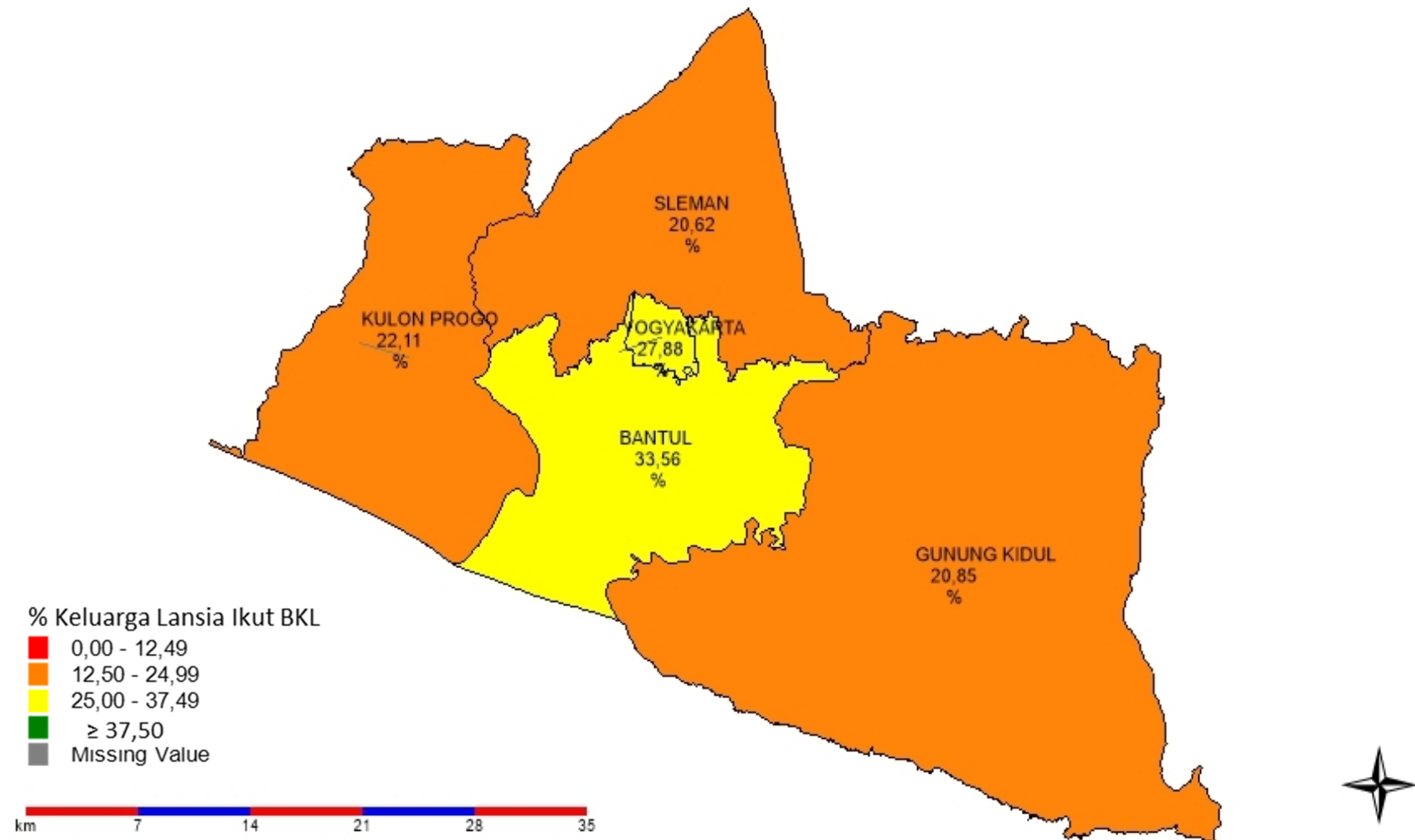
Tabel 18
Data Keluarga Lansia Provinsi D.I. Yogyakarta

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kulon Progo	10.357	36.480	46.837	22,11%
2.	Bantul	28.408	56.229	84.637	33,56%
3.	Gunung Kidul	19.078	72.427	91.505	20,85%
4.	Sleman	16.248	62.548	78.796	20,62%
5.	Kota Yogyakarta	8.242	21.319	29.561	27,88%
PROVINSI		82.333	249.003	331.336	24,85%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Sleman (20,62%), sedangkan persentase tertinggi adalah Bantul (33,56%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 16 Peta Kesertaan BKL Provinsi D.I. Yogyakarta



15. Provinsi Jawa Timur

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 3.479.662 keluarga, dimana 687.099 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 2.792.563 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 19,75% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL. Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Data Keluarga Lansia Provinsi Jawa Timur

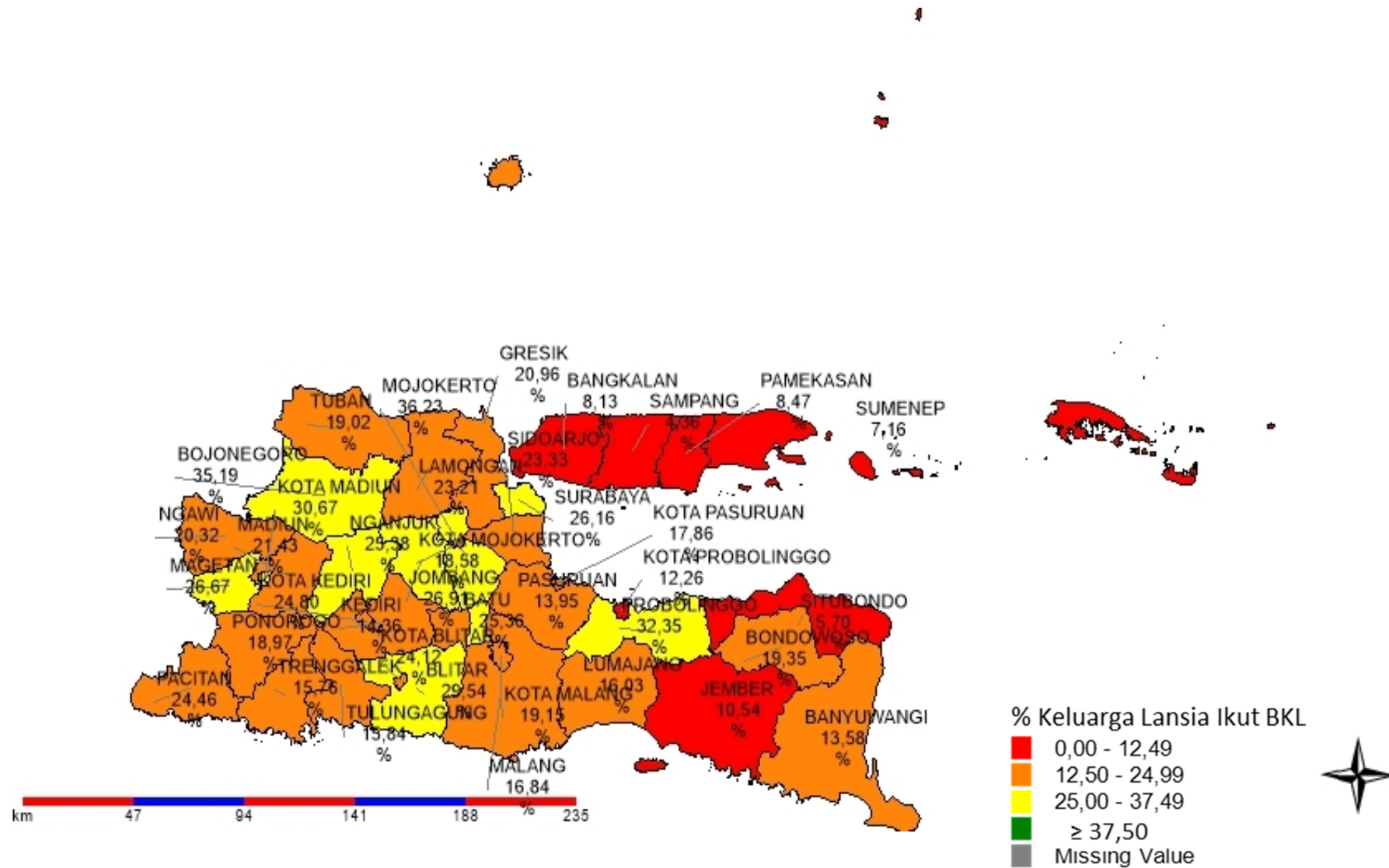
NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	% IKUT BKL
1.	Pacitan	17.253	53.287	70.540	24,46%
2.	Ponorogo	5.412	23.122	28.534	18,97%
3.	Trenggalek	13.036	69.684	82.720	15,76%
4.	Tulungagung	13.817	73.420	87.237	15,84%
5.	Blitar	37.356	89.100	126.456	29,54%
6.	Kediri	22.152	132.121	154.273	14,36%
7.	Malang	39.324	194.198	233.522	16,84%
8.	Lumajang	15.404	80.683	96.087	16,03%
9.	Jember	24.903	211.341	236.244	10,54%
10.	Banyuwangi	23.208	147.648	170.856	13,58%
11.	Bondowoso	15.948	66.461	82.409	19,35%
12.	Situbondo	3.518	58.229	61.747	5,70%
13.	Probolinggo	42.419	88.713	131.132	32,35%
14.	Pasuruan	20.013	123.428	143.441	13,95%
15.	Sidoarjo	29.834	98.058	127.892	23,33%
16.	Mojokerto	32.801	57.741	90.542	36,23%
17.	Jombang	30.976	84.142	115.118	26,91%
18.	Nganjuk	28.418	83.569	111.987	25,38%
19.	Madiun	20.480	75.084	95.564	21,43%
20.	Magetan	21.164	58.183	79.347	26,67%
21.	Ngawi	19.663	77.101	96.764	20,32%
22.	Bojonegoro	43.995	81.025	125.020	35,19%
23.	Tuban	19.400	82.600	102.000	19,02%
24.	Lamongan	32.549	107.682	140.231	23,21%
25.	Gresik	17.152	64.680	81.832	20,96%
26.	Bangkalan	5.232	59.142	64.374	8,13%
27.	Sampang	2.355	51.653	54.008	4,36%
28.	Pamekasan	5.544	59.943	65.487	8,47%
29.	Sumenep	7.269	94.222	101.491	7,16%
30.	Kota Kediri	5.276	15.999	21.275	24,80%
31.	Kota Blitar	2.537	7.982	10.519	24,12%

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
32.	Kota Malang	12.106	51.107	63.213	19,15%
33.	Kota Probolinggo	2.065	14.774	16.839	12,26%
34.	Kota Pasuruan	1.248	5.739	6.987	17,86%
35.	Kota Mojokerto	1.856	8.134	9.990	18,58%
36.	Kota Madiun	5.436	12.290	17.726	30,67%
37.	Kota Surabaya	41.968	118.468	160.436	26,16%
38.	Kota Batu	4.012	11.810	15.822	25,36%
PROVINSI		687.099	2.792.563	3.479.662	19,75%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Sampang (4,36%), sedangkan persentase tertinggi adalah Mojokerto (36,23%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 17 Peta Kesertaan BKL Provinsi Jawa Timur



16. Provinsi Banten

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 389.048 keluarga, dimana 41.522 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 347.526 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 10,67% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

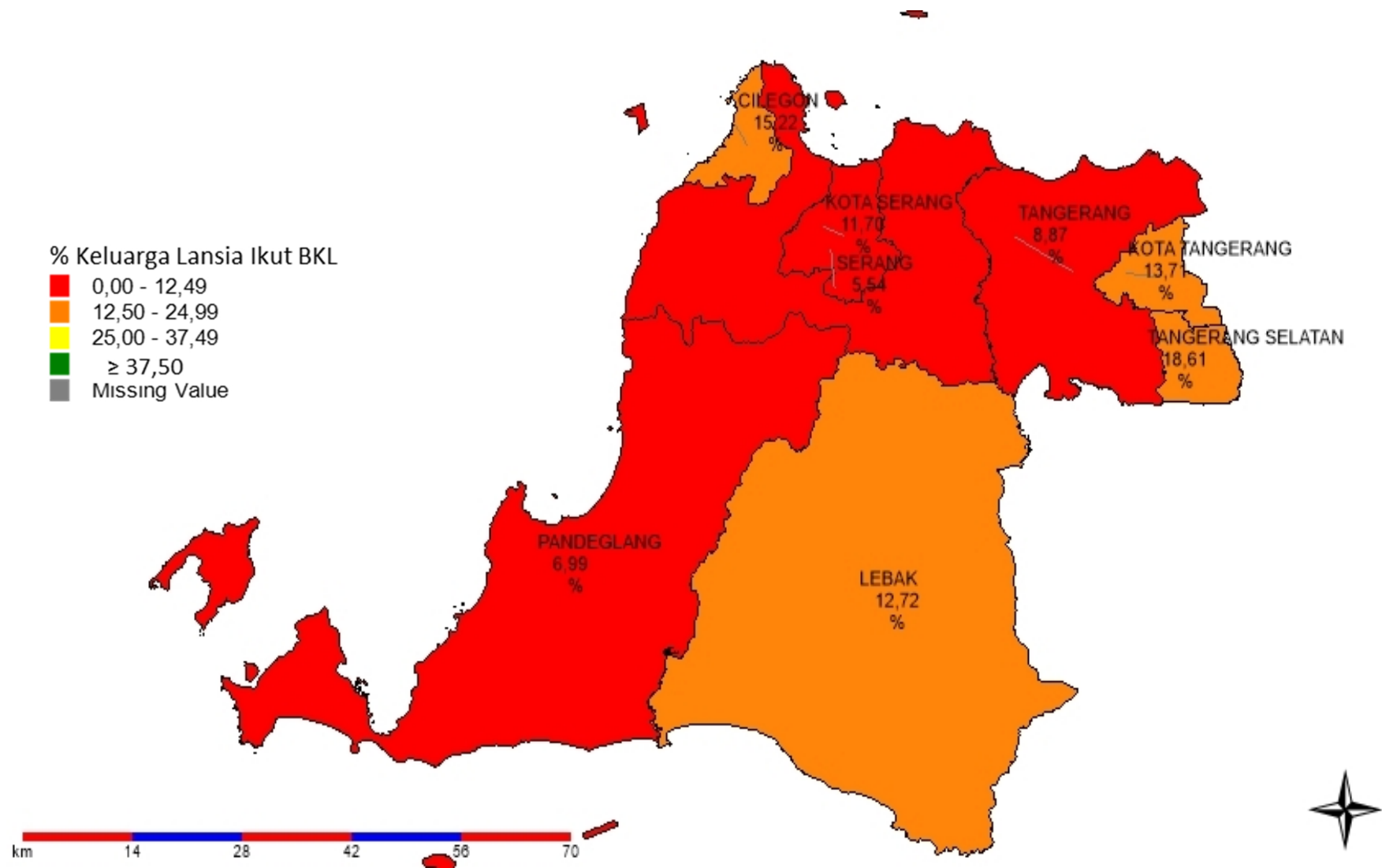
Tabel 20
Data Keluarga Lansia Provinsi Banten

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Pandeglang	3.937	52.356	56.293	6,99%
2.	Lebak	7.454	51.135	58.589	12,72%
3.	Tangerang	7.179	73.733	80.912	8,87%
4.	Serang	3.583	61.144	64.727	5,54%
5.	Kota Tangerang	7.368	46.380	53.748	13,71%
6.	Kota Cilegon	2.253	12.549	14.802	15,22%
7.	Kota Serang	2.391	18.049	20.440	11,70%
8.	Kota Tangerang Selatan	7.357	32.180	39.537	18,61%
PROVINSI		41.522	347.526	389.048	10,67%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Serang (5,54%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan (18,61%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 18 Peta Kesertaan BKL Provinsi Banten



17. Provinsi Bali

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 258.898 keluarga, dimana 43.800 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 215.098 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 16,92% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

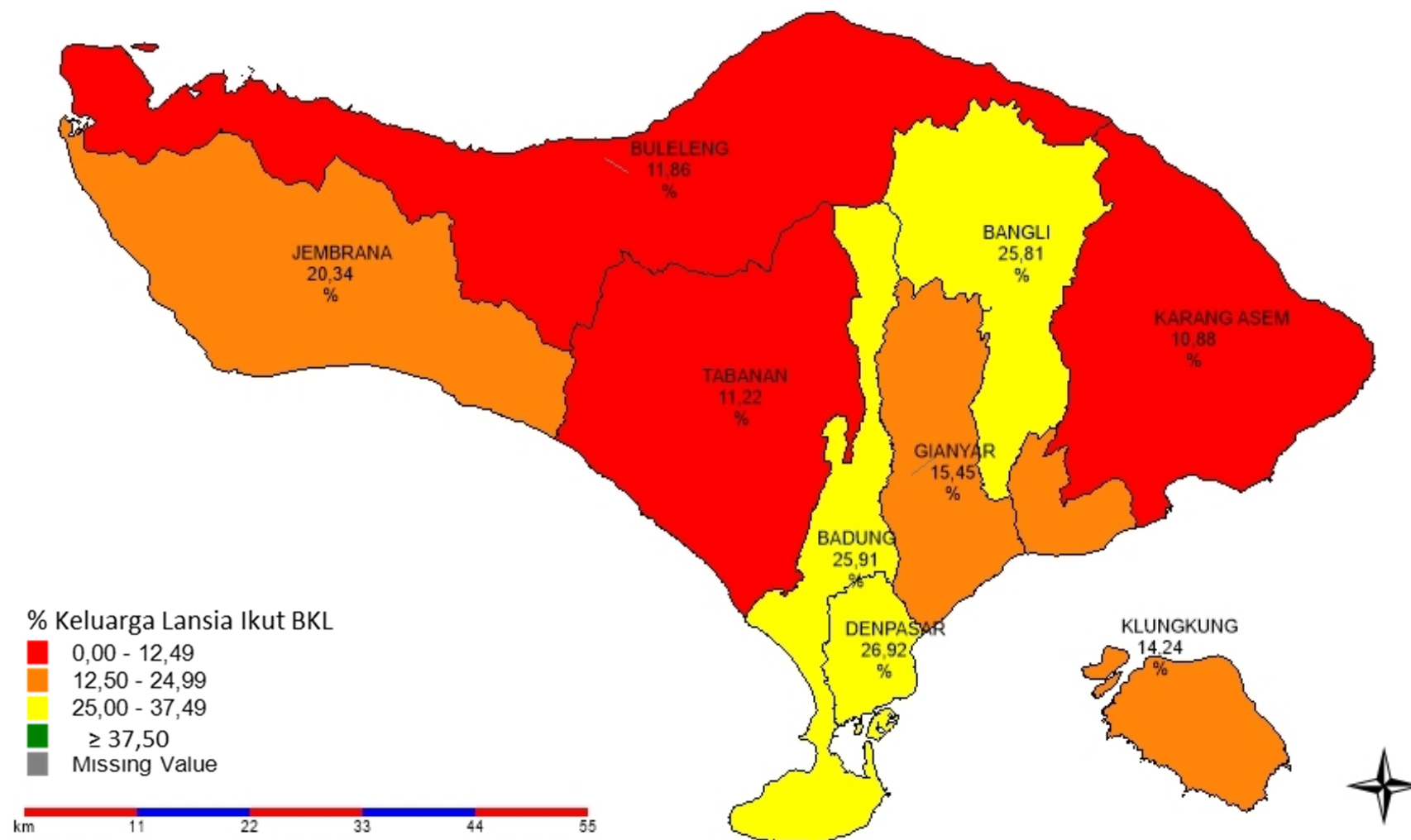
Tabel 21
Data Keluarga Lansia Provinsi Bali

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Jembrana	4.238	16.597	20.835	20,34%
2.	Tabanan	4.304	34.050	38.354	11,22%
3.	Badung	7.156	20.465	27.621	25,91%
4.	Gianyar	5.674	31.047	36.721	15,45%
5.	Klungkung	2.238	13.480	15.718	14,24%
6.	Bangli	4.792	13.777	18.569	25,81%
7.	Karangasem	3.786	31.017	34.803	10,88%
8.	Buleleng	4.907	36.464	41.371	11,86%
9.	Kota Denpasar	6.705	18.201	24.906	26,92%
PROVINSI		43.800	215.098	258.898	16,92%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Karangasem (10,88%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Denpasar (26,92%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 19 Peta Kesertaan BKL Provinsi Bali



18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 258.289 keluarga, dimana 30.751 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 227.538 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 11,91% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

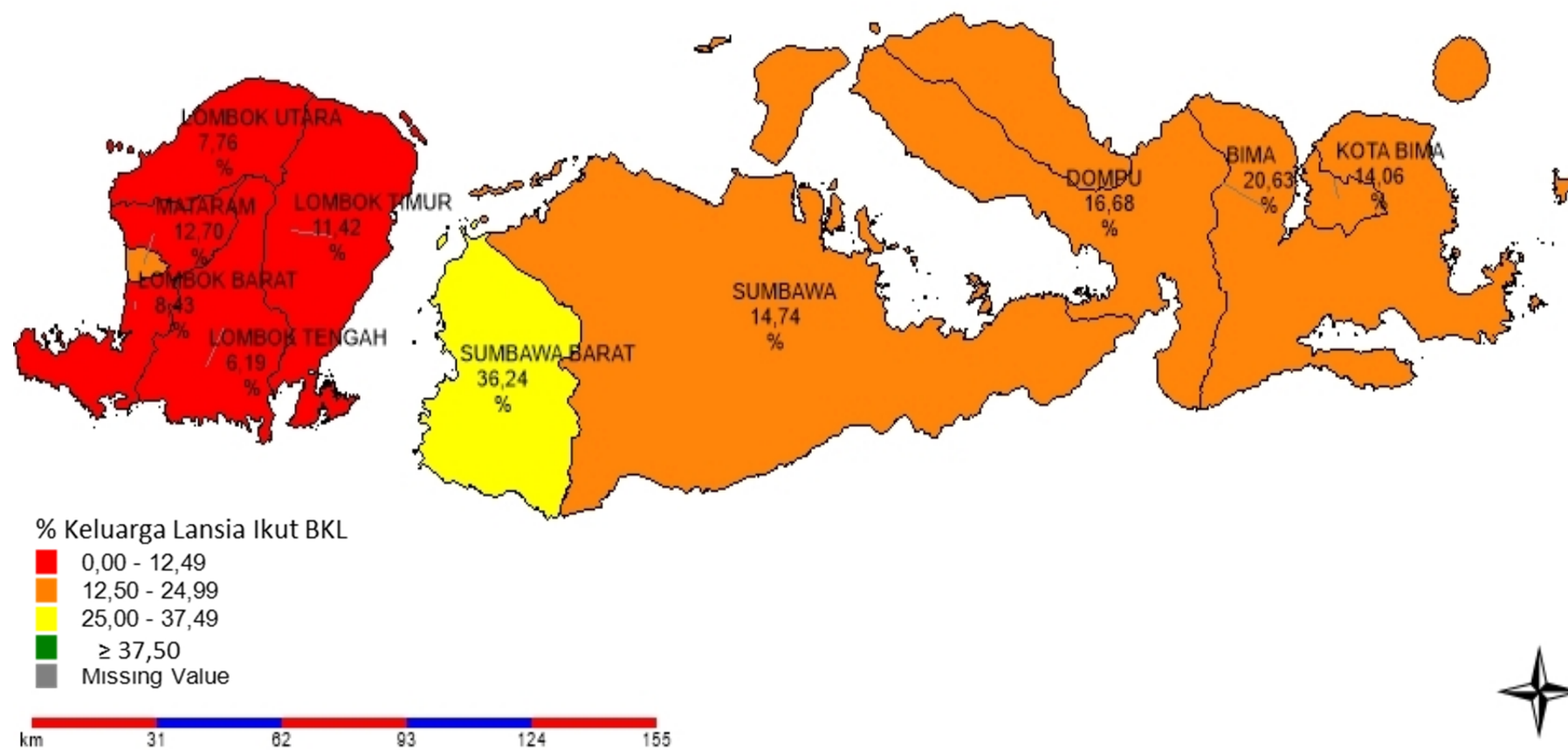
Tabel 22
Data Keluarga Lansia Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Lombok Barat	2.884	31.346	34.230	8,43%
2.	Lombok Tengah	3.418	51.800	55.218	6,19%
3.	Lombok Timur	7.728	59.933	67.661	11,42%
4.	Sumbawa	3.494	20.214	23.708	14,74%
5.	Dompu	1.698	8.482	10.180	16,68%
6.	Bima	4.992	19.204	24.196	20,63%
7.	Sumbawa Barat	2.388	4.201	6.589	36,24%
8.	Lombok Utara	905	10.756	11.661	7,76%
9.	Kota Mataram	2.332	16.029	18.361	12,70%
10.	Kota Bima	912	5.573	6.485	14,06%
PROVINSI		30.751	227.538	258.289	11,91%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Lombok Tengah (6,19%), sedangkan persentase tertinggi adalah Sumbawa Barat (36,24%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 20 Peta Kesertaan BKL Provinsi Nusa Tenggara Barat



19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 194.881 keluarga, dimana 49.523 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 145.358 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 25,41% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

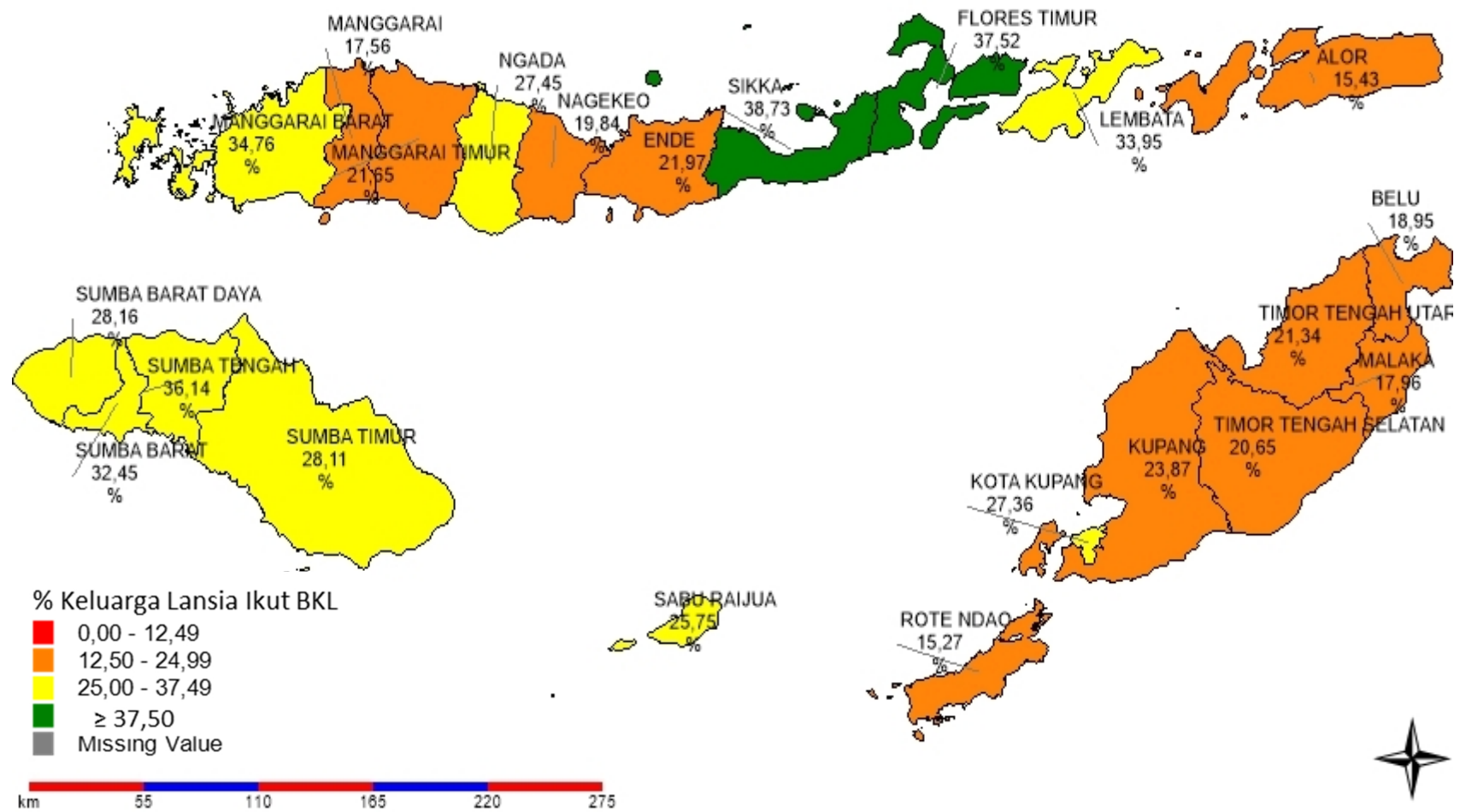
Tabel 23
Data Keluarga Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kupang	2.964	9.455	12.419	23,87%
2.	Timor Tengah Selatan	4.844	18.617	23.461	20,65%
3.	Timor Tengah Utara	2.486	9.161	11.647	21,34%
4.	Belu	1.531	6.550	8.081	18,95%
5.	Alor	1.307	7.161	8.468	15,43%
6.	Flores Timur	4.367	7.272	11.639	37,52%
7.	Sikka	5.980	9.460	15.440	38,73%
8.	Ende	2.772	9.845	12.617	21,97%
9.	Ngada	1.793	4.738	6.531	27,45%
10.	Manggarai	1.282	6.018	7.300	17,56%
11.	Sumba Timur	2.740	7.006	9.746	28,11%
12.	Sumba Barat	1.415	2.945	4.360	32,45%
13.	Lembata	2.342	4.556	6.898	33,95%
14.	Rote Ndao	829	4.599	5.428	15,27%
15.	Manggarai Barat	2.726	5.116	7.842	34,76%
16.	Nagekeo	1.421	5.741	7.162	19,84%
17.	Sumba Tengah	884	1.562	2.446	36,14%
18.	Sumba Barat Daya	2.069	5.279	7.348	28,16%
19.	Manggarai Timur	1.319	4.773	6.092	21,65%
20.	Sabu Raijua	1.067	3.076	4.143	25,75%
21.	Malaka	1.799	8.217	10.016	17,96%
22.	Kota Kupang	1.586	4.211	5.797	27,36%
PROVINSI		49.523	145.358	194.881	25,41%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Alor (15,43%), sedangkan persentase tertinggi adalah Sikka (38,73%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini

Gambar 21 Peta Kesertaan BKL Provinsi Nusa Tenggara Timur



20. Provinsi Kalimantan Barat

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 173.903 keluarga, dimana 12.182 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 161.721 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 7,01% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

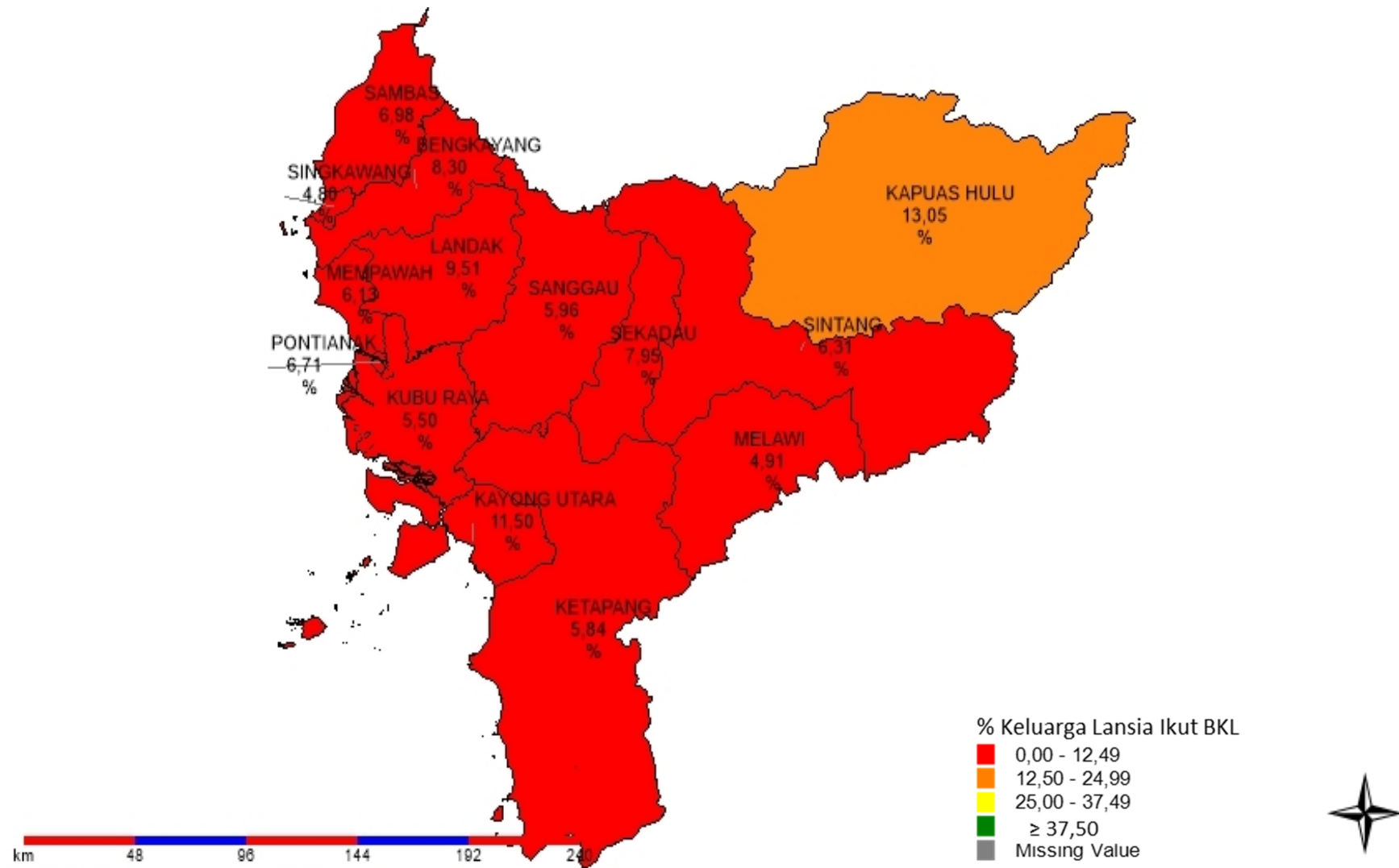
Tabel 24
Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Barat

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Sambas	1.931	25.748	27.679	6,98%
2.	Mempawah	824	12.612	13.436	6,13%
3.	Sanggau	1.032	16.272	17.304	5,96%
4.	Ketapang	657	10.597	11.254	5,84%
5.	Sintang	751	11.152	11.903	6,31%
6.	Kapuas Hulu	1.244	8.287	9.531	13,05%
7.	Bengkayang	796	8.797	9.593	8,30%
8.	Landak	1.010	9.605	10.615	9,51%
9.	Sekadau	520	6.017	6.537	7,95%
10.	Melawi	318	6.161	6.479	4,91%
11.	Kayong Utara	389	2.993	3.382	11,50%
12.	Kubu Raya	1.091	18.730	19.821	5,50%
13.	Kota Pontianak	1.239	17.217	18.456	6,71%
14.	Kota Singkawang	380	7.533	7.913	4,80%
PROVINSI		12.182	161.721	173.903	7,01%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Singkawang (4,80%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kapuas Hulu (13,05%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 22 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Barat



21. Provinsi Kalimantan Tengah

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 94.490 keluarga, dimana 93.123 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 1.367 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 98,55% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL. Data provinsi Kalimantan Tengah memiliki bias yang tinggi sehingga tidak disandingkan dengan provinsi lain secara nasional.

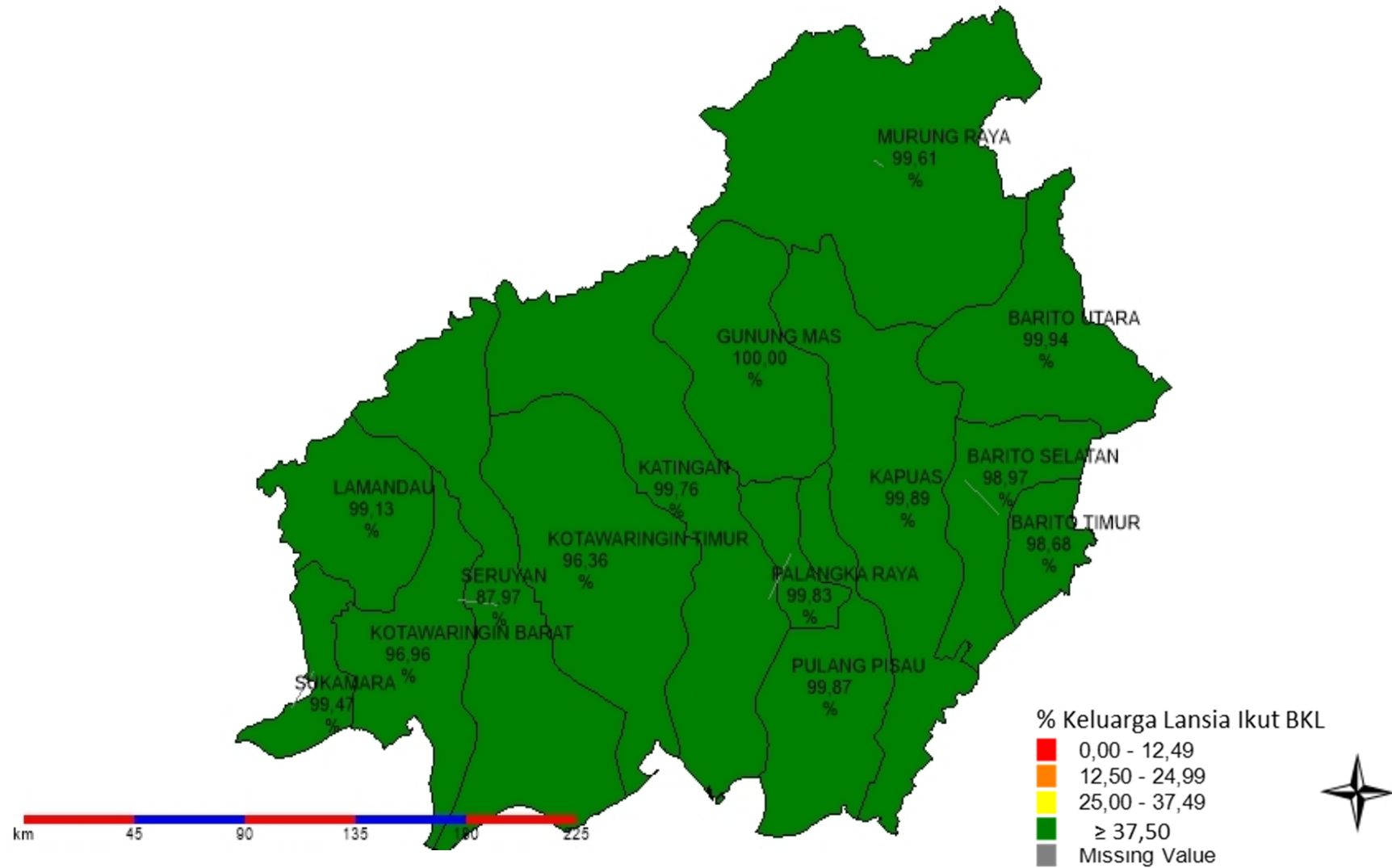
Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25
Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Tengah

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kotawaringin Barat	7.946	249	8.195	96,96%
2.	Kotawaringin Timur	13.829	523	14.352	96,36%
3.	Kapuas	15.795	17	15.812	99,89%
4.	Barito Selatan	6.747	70	6.817	98,97%
5.	Barito Utara	6.240	4	6.244	99,94%
6.	Katingan	6.537	16	6.553	99,76%
7.	Seruyan	2.501	342	2.843	87,97%
8.	Sukamara	1.684	9	1.693	99,47%
9.	Lamandau	3.301	29	3.330	99,13%
10.	Gunung Mas	4.091	0	4.091	100,00%
11.	Pulang Pisau	6.809	9	6.818	99,87%
12.	Murung Raya	2.570	10	2.580	99,61%
13.	Barito Timur	5.465	73	5.538	98,68%
14.	Kota Palangkaraya	9.608	16	9.624	99,83%
PROVINSI		93.123	1.367	94.490	98,55%

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini

Gambar 23 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Tengah



22. Provinsi Kalimantan Selatan

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 169.738 keluarga, dimana 20.104 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 149.634 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 11,84% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

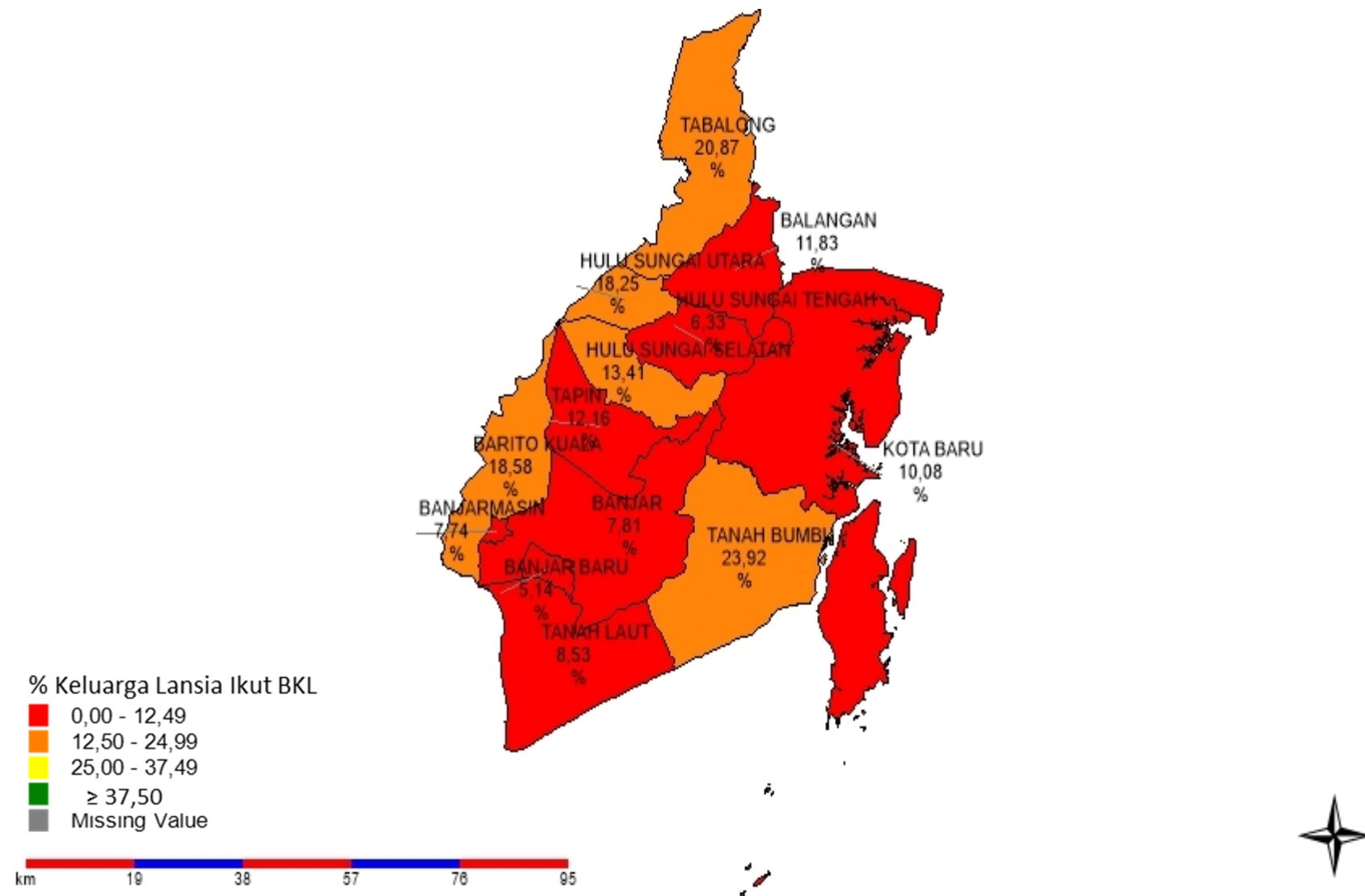
Tabel 26
Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Tanah Laut	1.134	12.160	13.294	8,53%
2.	Kotabaru	977	8.714	9.691	10,08%
3.	Banjar	1.653	19.504	21.157	7,81%
4.	Barito Kuala	2.459	10.776	13.235	18,58%
5.	Tapin	862	6.227	7.089	12,16%
6.	Hulu Sungai Selatan	1.816	11.729	13.545	13,41%
7.	Hulu Sungai Tengah	923	13.653	14.576	6,33%
8.	Hulu Sungai Utara	2.218	9.933	12.151	18,25%
9.	Tabalong	1.946	7.380	9.326	20,87%
10.	Tanah Bumbu	2.636	8.385	11.021	23,92%
11.	Balangan	711	5.300	6.011	11,83%
12.	Kota Banjarmasin	2.332	27.808	30.140	7,74%
13.	Kota Banjarbaru	437	8.065	8.502	5,14%
PROVINSI		20.104	149.634	169.738	11,84%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Banjarbaru (5,14%), sedangkan persentase tertinggi adalah Tanah Bumbu (23,92%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 24 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Selatan



23. Provinsi Kalimantan Timur

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 109.808 keluarga, dimana 13.132 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 96.676 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 11,96% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

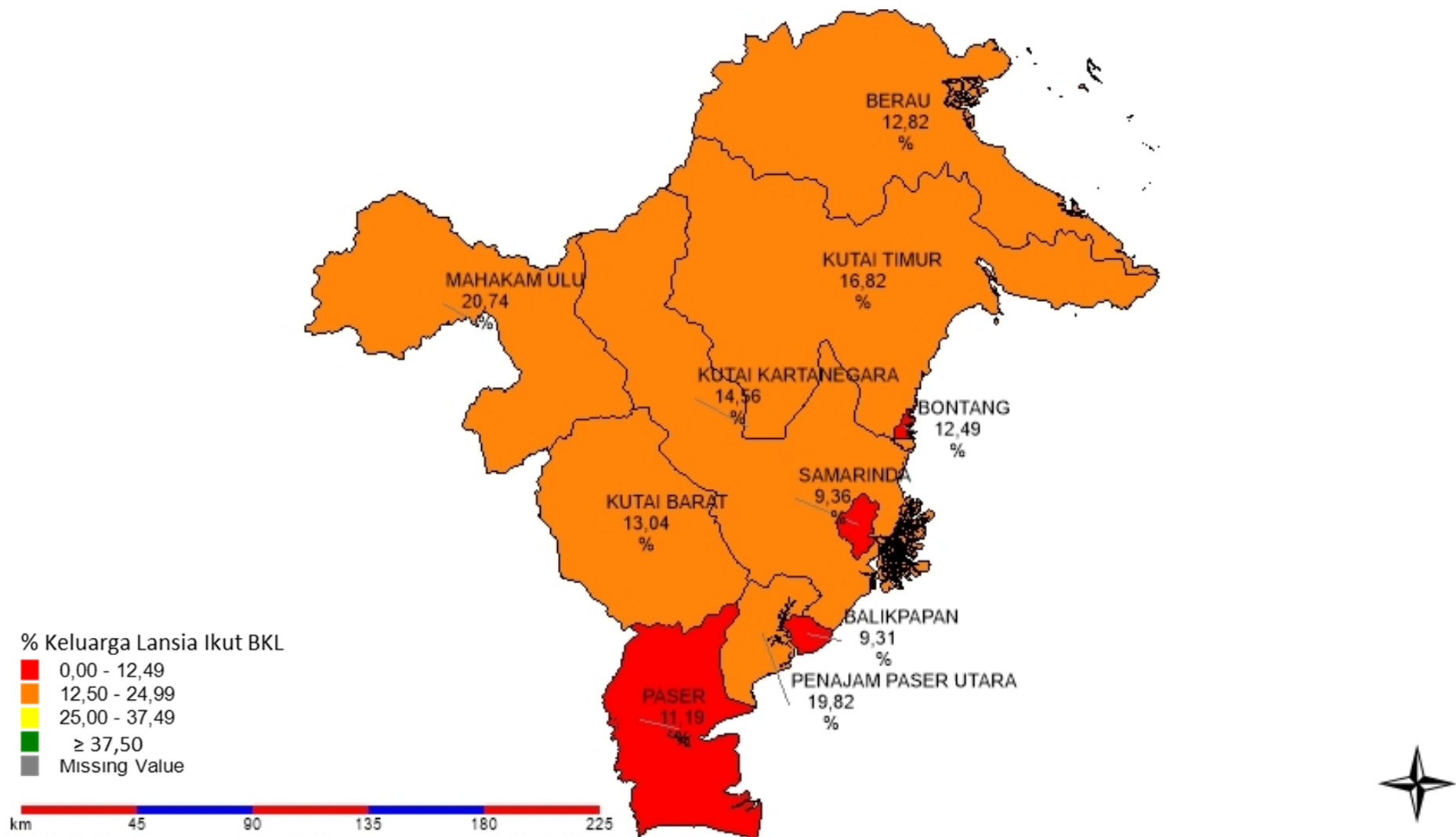
Tabel 27
Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Pasir	543	4.308	4.851	11,19%
2.	Kutai Kertanegara	2.933	17.213	20.146	14,56%
3.	Berau	619	4.209	4.828	12,82%
4.	Kutai Barat	670	4.469	5.139	13,04%
5.	Kutai Timur	427	2.112	2.539	16,82%
6.	Penajam Paser Utara	1.470	5.948	7.418	19,82%
7.	Mahakam Hulu	123	470	593	20,74%
8.	Kota Balikpapan	2.291	22.308	24.599	9,31%
9.	Kota Samarinda	2.160	20.928	23.088	9,36%
10.	Kota Bontang	422	2.956	3.378	12,49%
PROVINSI		13.132	96.676	109.808	11,96%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kota Balikpapan (9,31%), sedangkan persentase tertinggi adalah Mahakam Hulu (20,74%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 25 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Timur



24. Provinsi Kalimantan Utara

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 93 keluarga, dimana 24 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 69 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 25,81% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

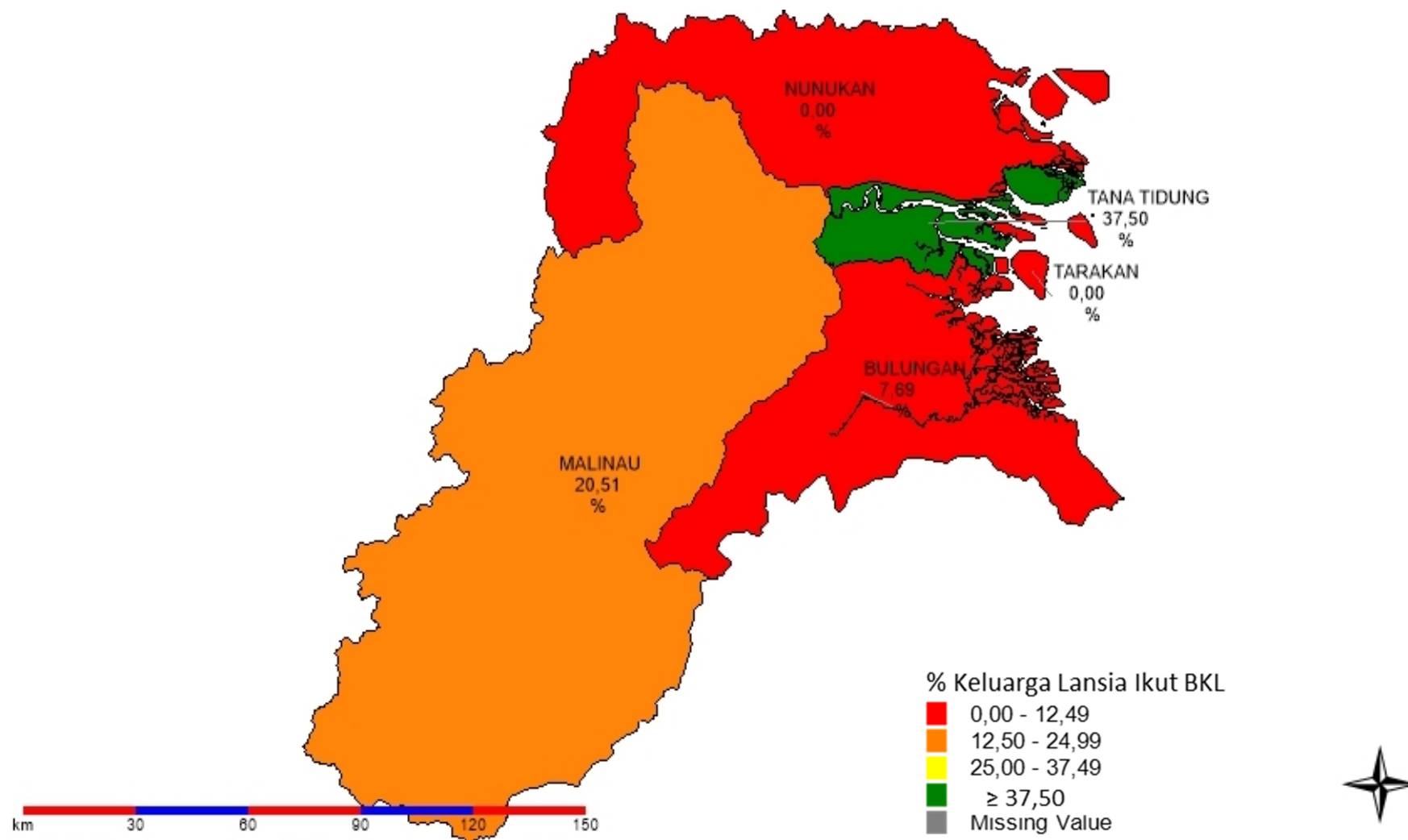
Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28
Data Keluarga Lansia Provinsi Kalimantan Utara

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Bulungan	1	12	13	7,69%
2.	Nunukan	0	1	1	0,00%
3.	Malinau	8	31	39	20,51%
4.	Tana Tidung	15	25	40	37,50%
5.	Kota Tarakan	0	0	0	0,00%
PROVINSI		24	69	93	25,81%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Nunukan dan Kota Tarakan (0%), sedangkan persentase tertinggi adalah Tana Tidung (37,50%).

Gambar 26 Peta Kesertaan BKL Provinsi Kalimantan Utara



25. Provinsi Sulawesi Utara

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 160.673 keluarga, dimana 65.153 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 95.520 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 40,55% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

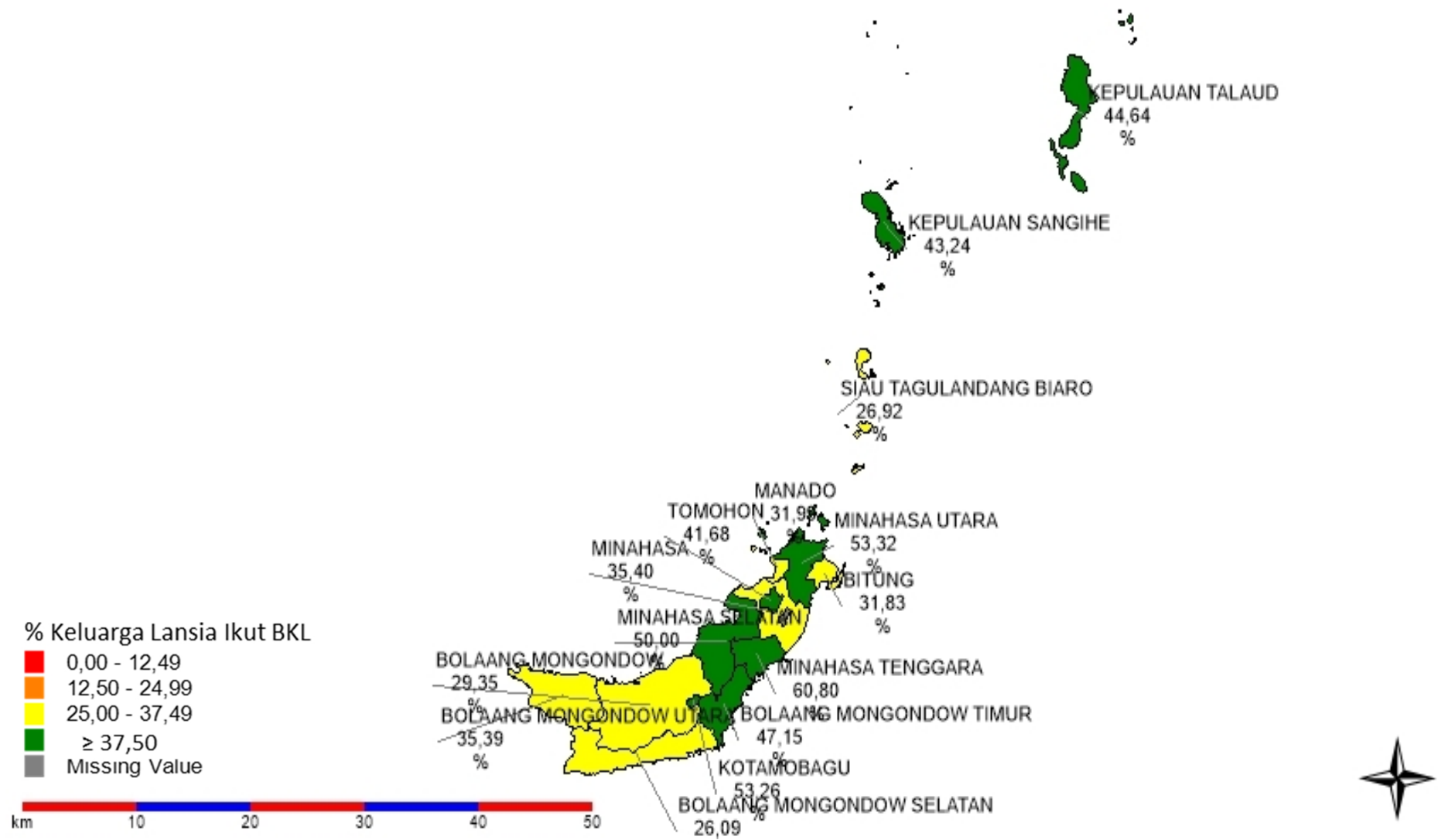
Tabel 29
Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Bolaang Mongondow	4.030	9.700	13.730	29,35%
2.	Minahasa	8.318	15.181	23.499	35,40%
3.	Kepulauan Sangihe	4.874	6.397	11.271	43,24%
4.	Kepulauan Talaud	2.912	3.612	6.524	44,64%
5.	Minahasa Selatan	8.596	8.596	17.192	50,00%
6.	Minahasa Utara	8.538	7.475	16.013	53,32%
7.	Minahasa Tenggara	4.898	3.158	8.056	60,80%
8.	Bolaang Mongondow Utara	1.667	3.043	4.710	35,39%
9.	Kep. Siau Tagulandang Biaro	1.516	4.115	5.631	26,92%
10.	Bolaang Mongondow Timur	1.976	2.215	4.191	47,15%
11.	Bolaang Mongondow Selatan	751	2.127	2.878	26,09%
12.	Kota Manado	7.086	15.064	22.150	31,99%
13.	Kota Bitung	3.460	7.410	10.870	31,83%
14.	Kota Tomohon	3.251	4.549	7.800	41,68%
15.	Kota Kotamobagu	3.280	2.878	6.158	53,26%
PROVINSI		65.153	95.520	160.673	40,55%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Bolaang Mongondow Selatan (26,09%), sedangkan persentase tertinggi adalah Minahasa Tenggara (60,80%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 27 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Utara



26. Provinsi Sulawesi Tengah

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 124.955 keluarga, dimana 22.779 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 102.176 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 18,23% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

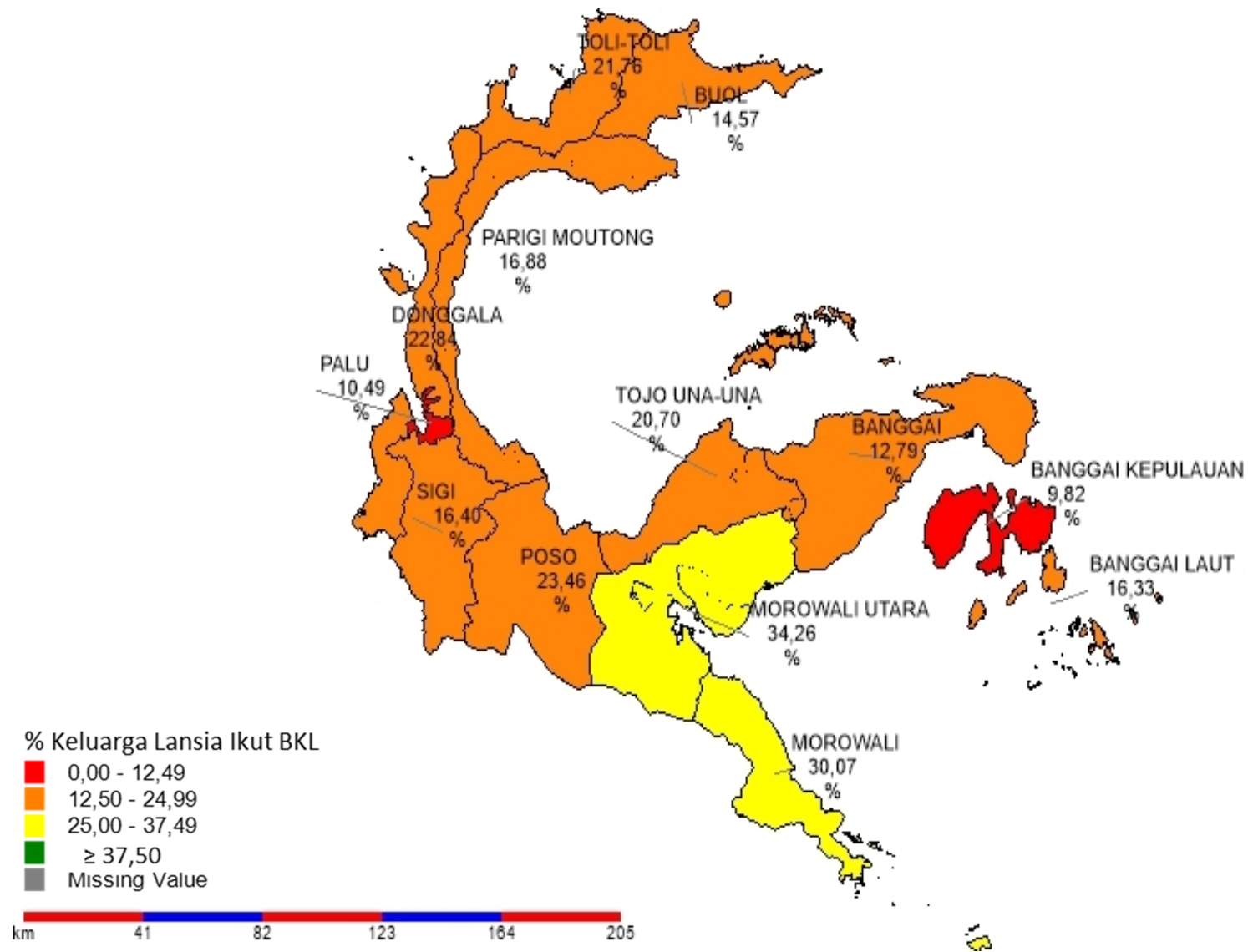
Tabel 30
Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Banggai	2.390	16.298	18.688	12,79%
2.	Poso	2.856	9.318	12.174	23,46%
3.	Donggala	2.865	9.677	12.542	22,84%
4.	Toli-Toli	2.200	7.911	10.111	21,76%
5.	Buol	815	4.777	5.592	14,57%
6.	Morowali	1.485	3.454	4.939	30,07%
7.	Banggai Kepulauan	629	5.779	6.408	9,82%
8.	Parigi Mautong	3.160	15.562	18.722	16,88%
9.	Tojo Una-Una	1.264	4.841	6.105	20,70%
10.	Sigi	1.700	8.667	10.367	16,40%
11.	Banggai Laut	458	2.347	2.805	16,33%
12.	Morowali Utara	1.767	3.390	5.157	34,26%
13.	Kota Palu	1.190	10.155	11.345	10,49%
PROVINSI		22.779	102.176	124.955	18,23%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Banggai Kepulauan (9,82%), sedangkan persentase tertinggi adalah Morowali Utara (34,26%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 28 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Tengah



27. Provinsi Sulawesi Selatan

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 600.135 keluarga, dimana 112.896 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 487.239 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 18,81% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

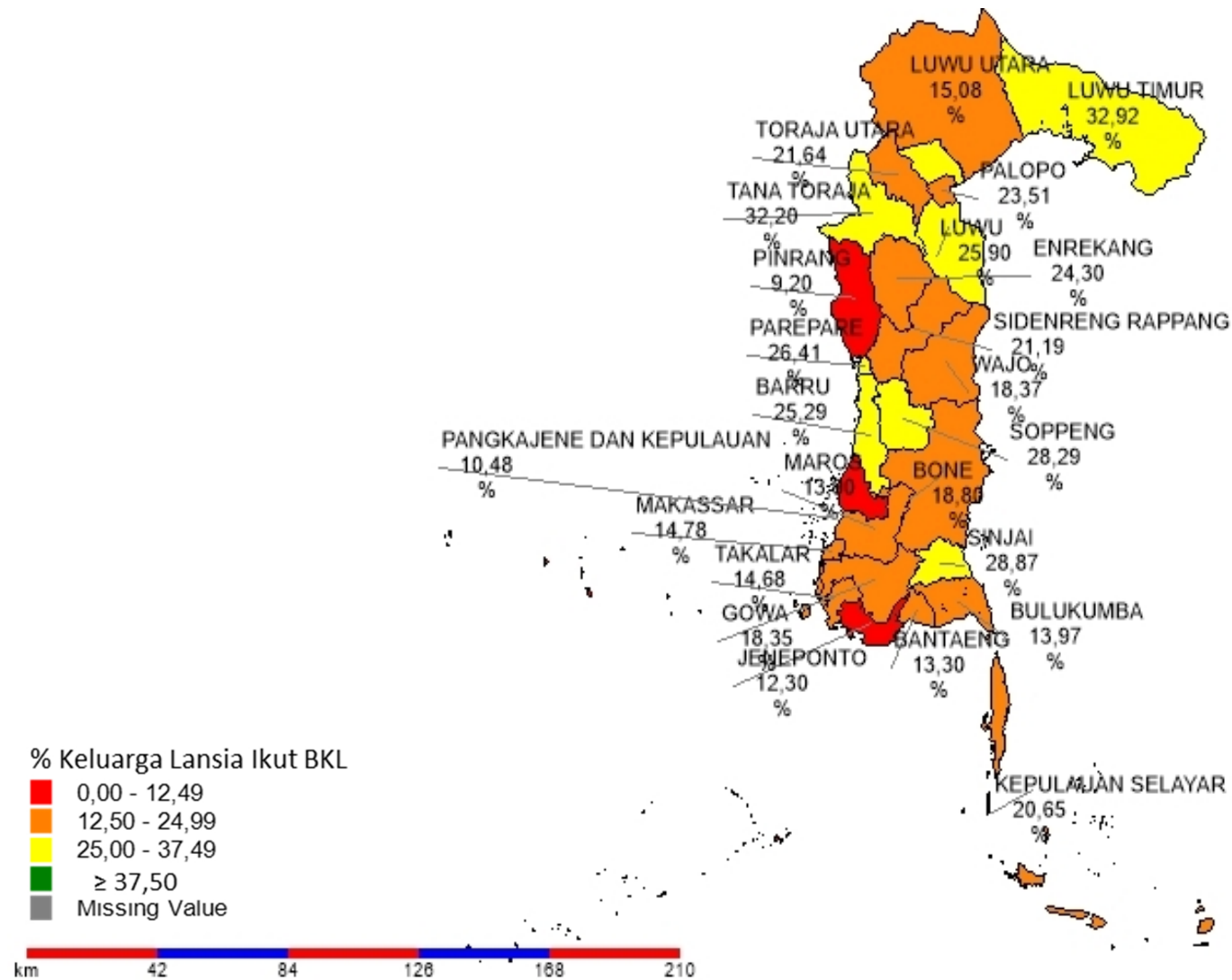
Tabel 31
Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Selayar	2.396	9.207	11.603	20,65%
2.	Bulukumba	4.304	26.503	30.807	13,97%
3.	Bantaeng	1.845	12.031	13.876	13,30%
4.	Jeneponto	2.805	19.998	22.803	12,30%
5.	Takalar	3.148	18.298	21.446	14,68%
6.	Gowa	8.757	38.964	47.721	18,35%
7.	Sinjai	5.374	13.241	18.615	28,87%
8.	Bone	12.171	52.585	64.756	18,80%
9.	Maros	3.010	18.652	21.662	13,90%
10.	Pangkajene Kepulauan	2.305	19.685	21.990	10,48%
11.	Barro	4.202	12.410	16.612	25,29%
12.	Soppeng	6.967	17.664	24.631	28,29%
13.	Wajo	6.843	30.398	37.241	18,37%
14.	Sidenreng Rappang	4.674	17.382	22.056	21,19%
15.	Pinrang	2.458	24.262	26.720	9,20%
16.	Enrekang	3.970	12.369	16.339	24,30%
17.	Luwu	5.967	17.071	23.038	25,90%
18.	Tana Toraja	5.236	11.023	16.259	32,20%
19.	Luwu Utara	2.880	16.212	19.092	15,08%
20.	Luwu Timur	4.564	9.302	13.866	32,92%
21.	Toraja Utara	3.616	13.097	16.713	21,64%
22.	Kota Makassar	11.103	63.997	75.100	14,78%
23.	Kota Pare-Pare	2.371	6.608	8.979	26,41%
24.	Kota Palopo	1.930	6.280	8.210	23,51%
PROVINSI		112.896	487.239	600.135	18,81%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Pinrang (9,20%), sedangkan persentase tertinggi adalah Luwu Timur (32,92%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 29 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Selatan



28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 123.447 keluarga, dimana 28.661 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 94.786 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 23,22% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

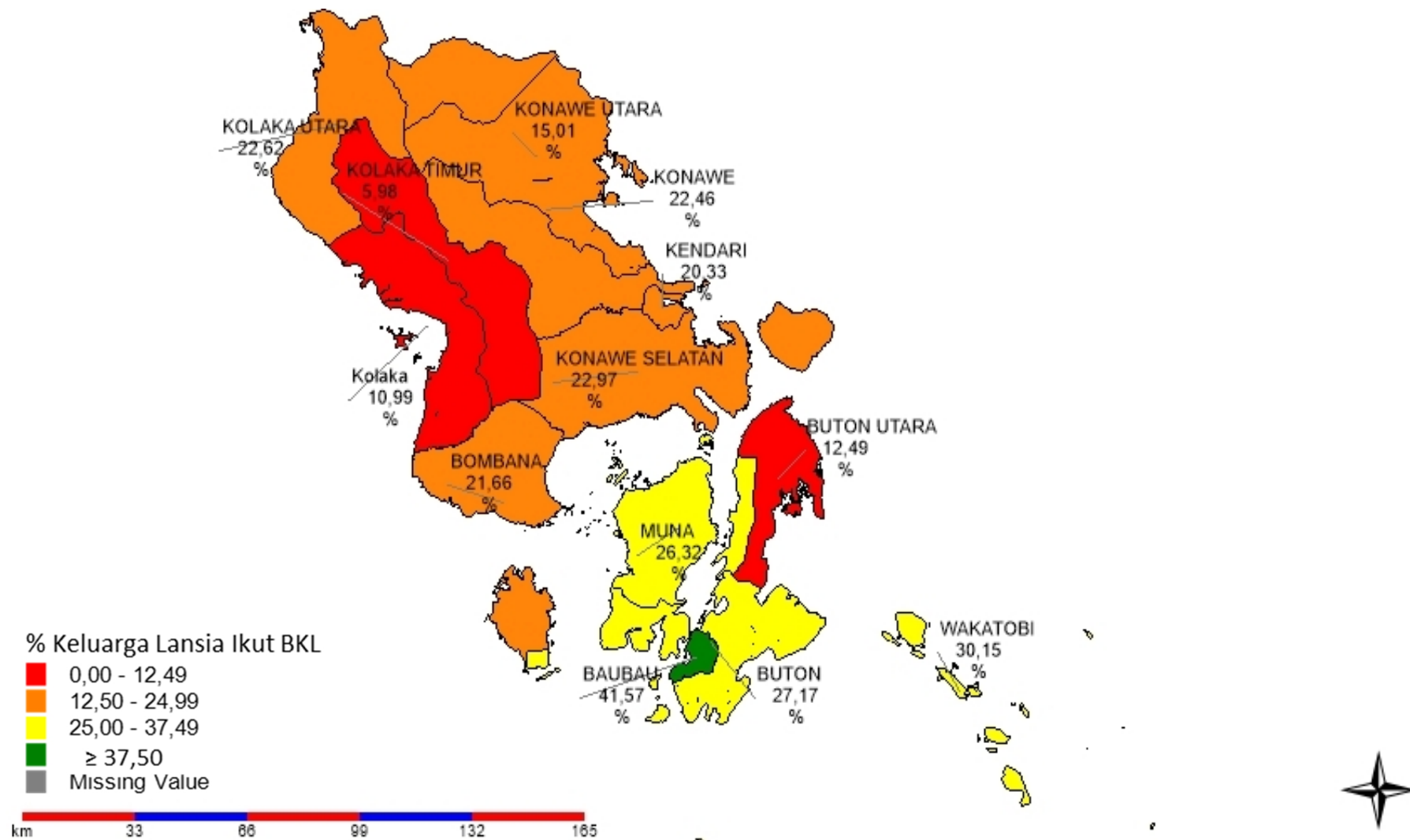
Tabel 32
Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kolaka	1.133	9.173	10.306	10,99%
2.	Konawe	2.853	9.848	12.701	22,46%
3.	Muna	3.265	9.138	12.403	26,32%
4.	Buton	1.731	4.640	6.371	27,17%
5.	Konawe Selatan	3.151	10.566	13.717	22,97%
6.	Bombana	1.557	5.633	7.190	21,66%
7.	Wakatobi	2.245	5.200	7.445	30,15%
8.	Kolaka Utara	1.359	4.649	6.008	22,62%
9.	Konawe Utara	420	2.379	2.799	15,01%
10.	Buton Utara	382	2.676	3.058	12,49%
11.	Kolaka Timur	323	5.081	5.404	5,98%
12.	Konawe Kepulauan	626	1.526	2.152	29,09%
13.	Muna Barat	825	3.967	4.792	17,22%
14.	Buton Tengah	1.949	4.468	6.417	30,37%
15.	Buton Selatan	1.647	3.630	5.277	31,21%
16.	Kota Kendari	1.954	7.657	9.611	20,33%
17.	Kota Bau Bau	3.241	4.555	7.796	41,57%
PROVINSI		28.661	94.786	123.447	23,22%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Kolaka Timur (5,98%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Bau Bau (41,57%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 30 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Tenggara



29. Provinsi Gorontalo

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 54.601 keluarga, dimana 20.518 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 34.083 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 37,58% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

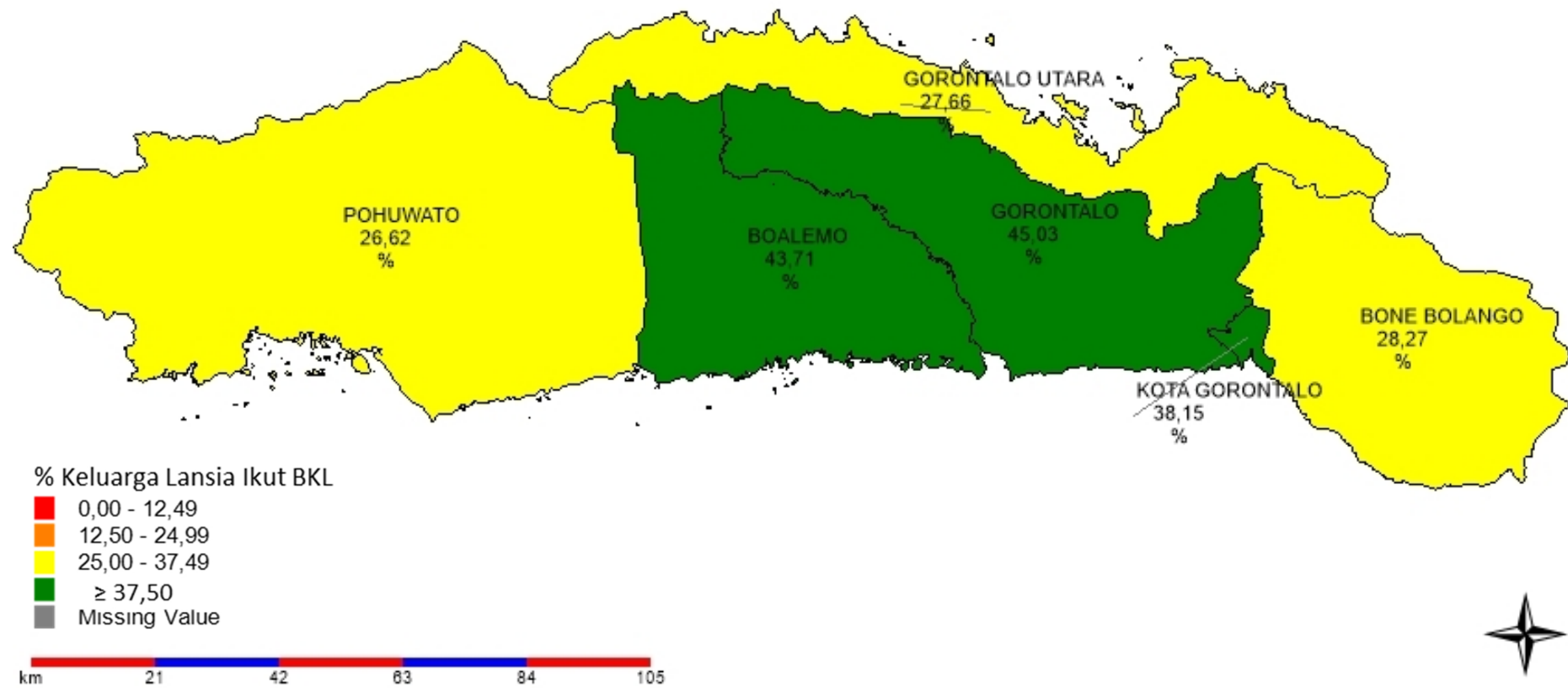
Tabel 33
Data Keluarga Lansia Provinsi Gorontalo

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Kab. Gorontalo	8.346	10.188	18.534	45,03%
2.	Boalemo	3.321	4.276	7.597	43,71%
3.	Bone Bolango	2.568	6.516	9.084	28,27%
4.	Pohuwato	1.245	3.432	4.677	26,62%
5.	Gorontalo Utara	1.512	3.954	5.466	27,66%
6.	Kota Gorontalo	3.526	5.717	9.243	38,15%
PROVINSI		20.518	34.083	54.601	37,58%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Pahuwato (26,62%), sedangkan persentase tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo (45,03%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 31 Peta Kesertaan BKL Provinsi Gorontalo



30. Provinsi Sulawesi Barat

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 57.872 keluarga, dimana 5.595 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 52.277 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 9,67% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

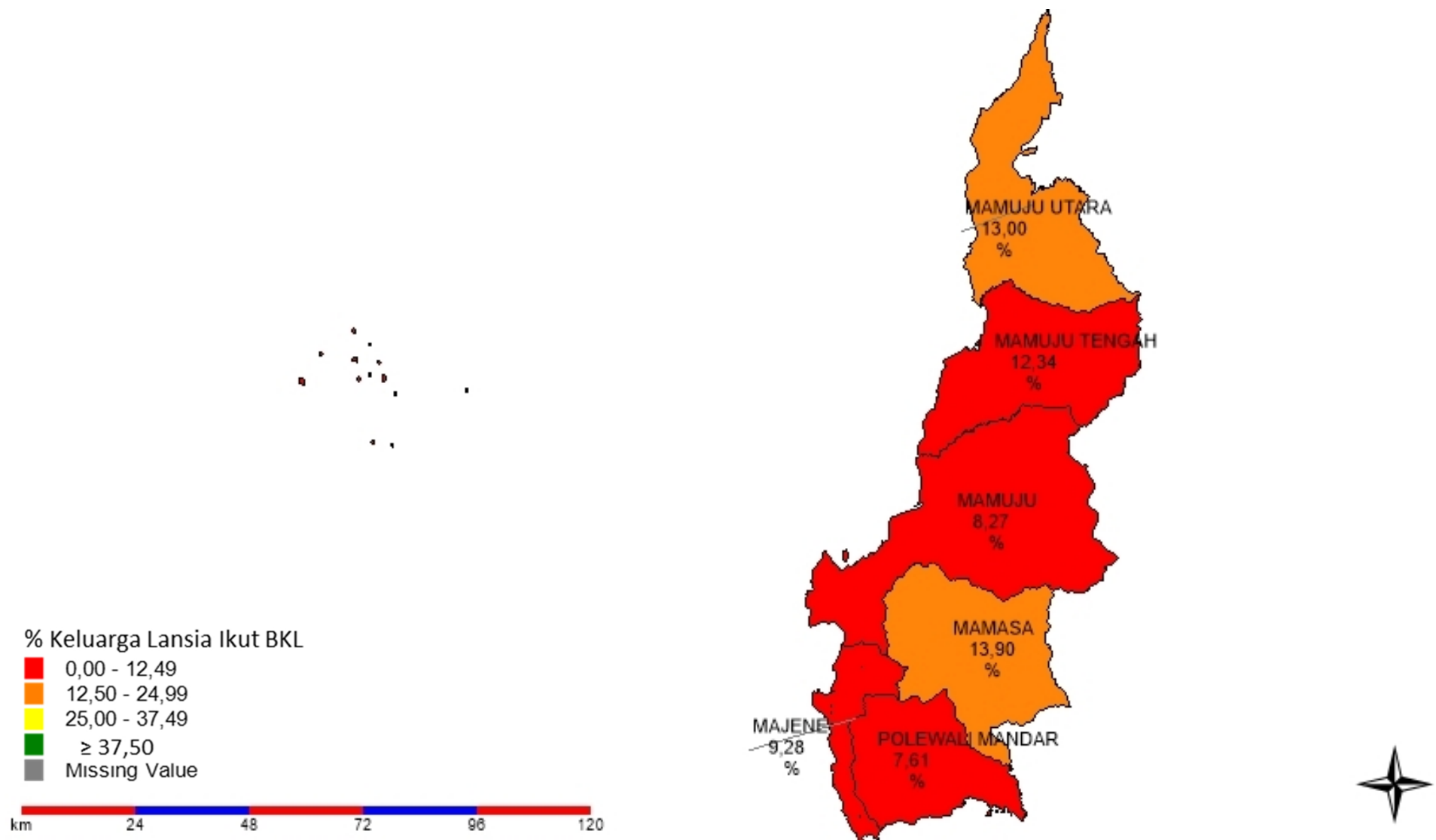
Tabel 34
Data Keluarga Lansia Provinsi Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Mamuju Utara	566	3.789	4.355	13,00%
2.	Mamuju	688	7.633	8.321	8,27%
3.	Mamasa	1.196	7.411	8.607	13,90%
4.	Polewali Mandar	1.780	21.606	23.386	7,61%
5.	Majene	800	7.824	8.624	9,28%
6.	Mamuju Tengah	565	4.014	4.579	12,34%
PROVINSI		5.595	52.277	57.872	9,67%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Polewali Mandar (7,61%), sedangkan persentase tertinggi adalah Mamasa (13,90%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 32 Peta Kesertaan BKL Provinsi Sulawesi Barat



31. Provinsi Maluku

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 70.259 keluarga, dimana 13.745 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 56.514 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 19,56% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

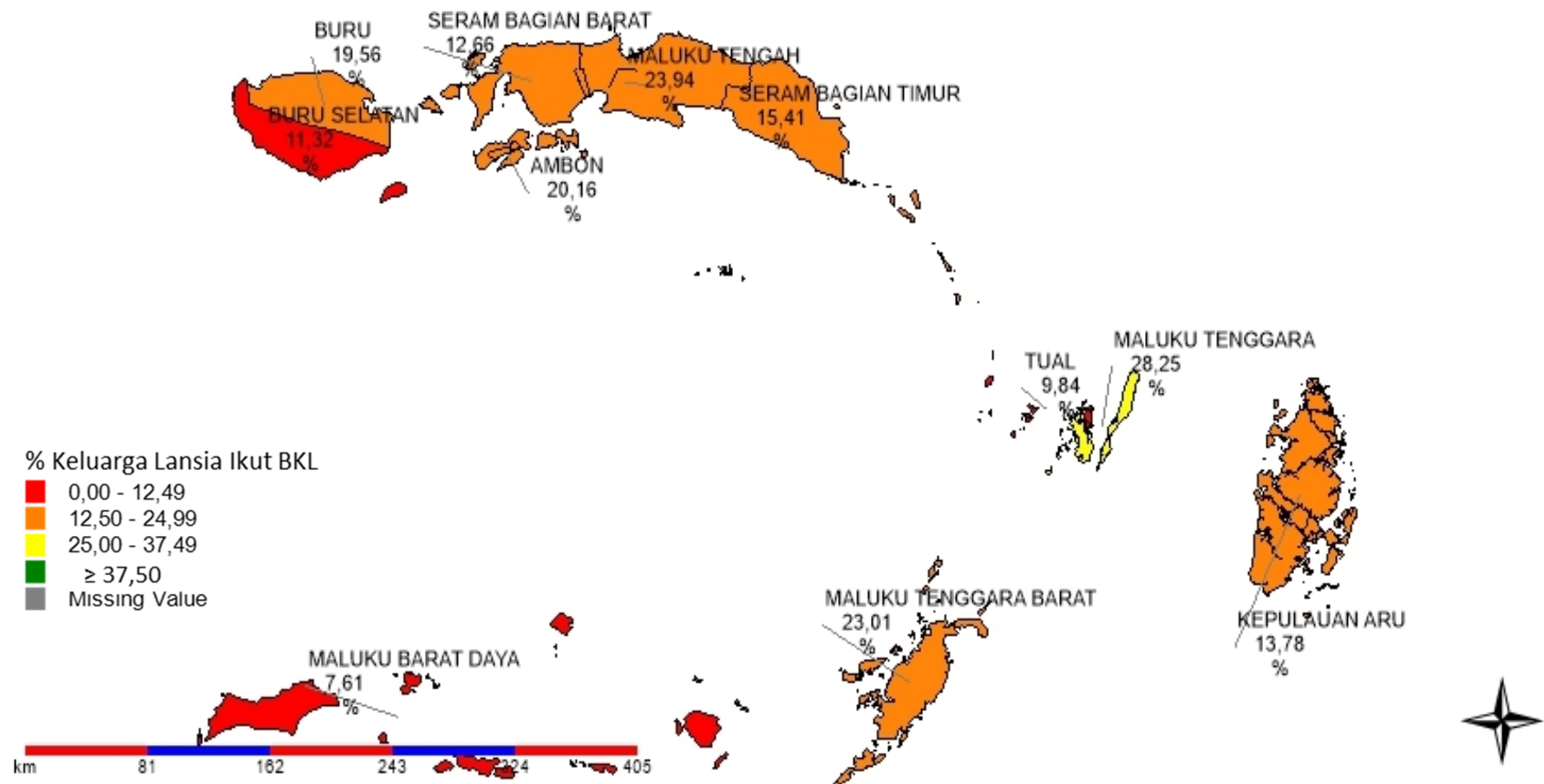
Tabel 35
Data Keluarga Lansia Provinsi Maluku

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Maluku Tengah	4.694	14.912	19.606	23,94%
2.	Maluku Tenggara	1.672	4.246	5.918	28,25%
3.	Maluku Tenggara Barat	1.182	3.954	5.136	23,01%
4.	Buru	894	3.676	4.570	19,56%
5.	Seram Bagian Timur	425	2.333	2.758	15,41%
6.	Seram Bagian Barat	829	5.717	6.546	12,66%
7.	Kepulauan Aru	435	2.722	3.157	13,78%
8.	Maluku Barat Daya	285	3.458	3.743	7,61%
9.	Buru Selatan	180	1.410	1.590	11,32%
10.	Kota Ambon	2.838	11.237	14.075	20,16%
11.	Kota Tual	311	2.849	3.160	9,84%
PROVINSI		13.745	56.514	70.259	19,56%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Maluku Barat Daya (7,61%), sedangkan persentase tertinggi adalah Maluku Tenggara (28,25%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 33 Peta Kesertaan BKL Provinsi Maluku



32. Provinsi Maluku Utara

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 39.752 keluarga, dimana 6.569 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 33.183 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 16,52% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

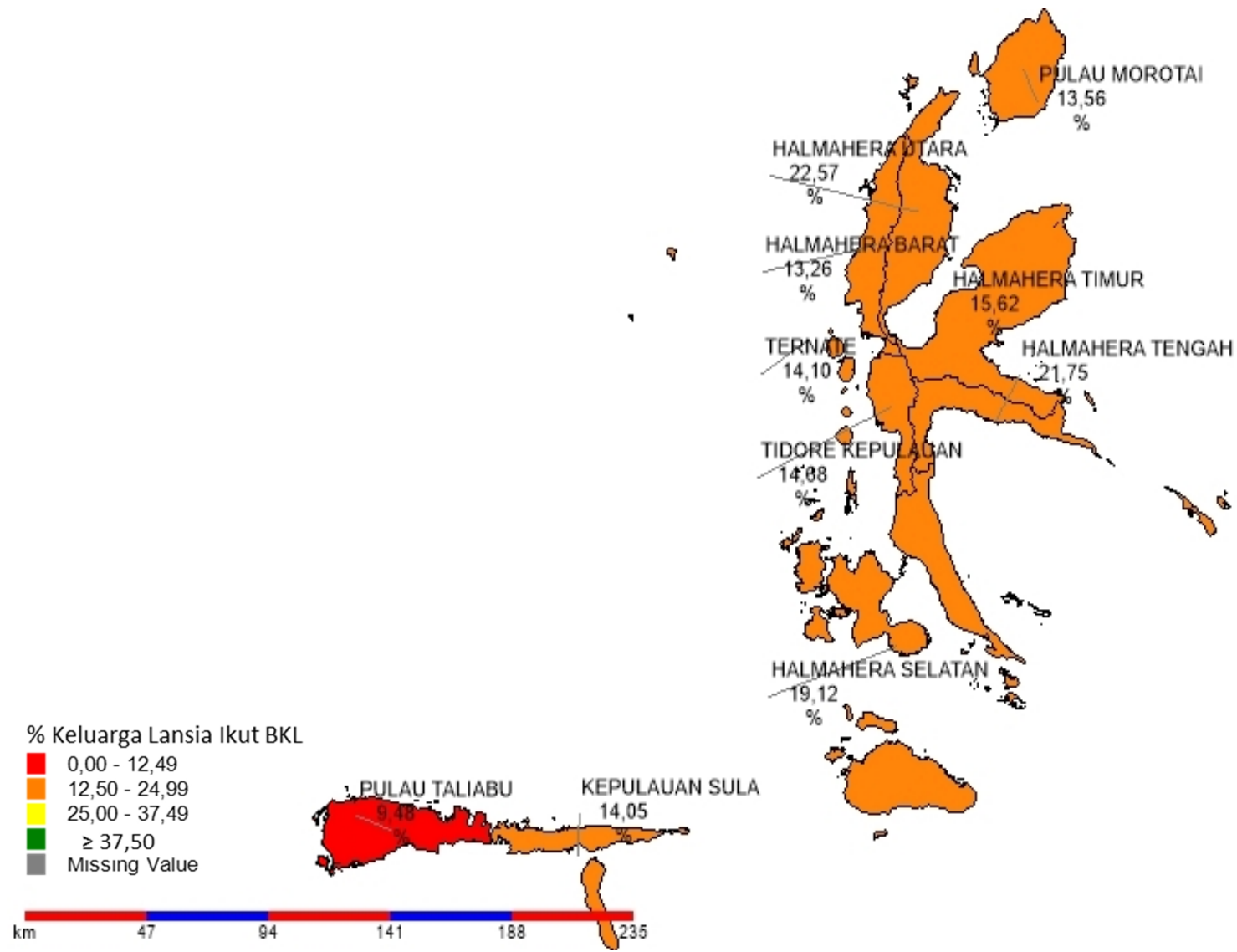
Tabel 36
Data Keluarga Lansia Provinsi Maluku Utara

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Halmahera Barat	645	4.221	4.866	13,26%
2.	Halmahera Tengah	319	1.148	1.467	21,75%
3.	Halmahera Utara	1.549	5.314	6.863	22,57%
4.	Halmahera Selatan	1.323	5.596	6.919	19,12%
5.	Kepulauan Sula	381	2.331	2.712	14,05%
6.	Halmahera Timur	426	2.301	2.727	15,62%
7.	Pulau Morotai	309	1.969	2.278	13,56%
8.	Pulau Taliabu	175	1.671	1.846	9,48%
9.	Kota Ternate	904	5.506	6.410	14,10%
10.	Kota Tidore Kepulauan	538	3.126	3.664	14,68%
PROVINSI		6.569	33.183	39.752	16,52%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Pulau Taliabu (9,48%), sedangkan persentase tertinggi adalah Halmahera Utara (22,57%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 34 Peta Kesertaan BKL Provinsi Maluku Utara



33. Provinsi Papua Barat

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 13.663 keluarga, dimana 3.933 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 9.730 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 28,79% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL.

Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

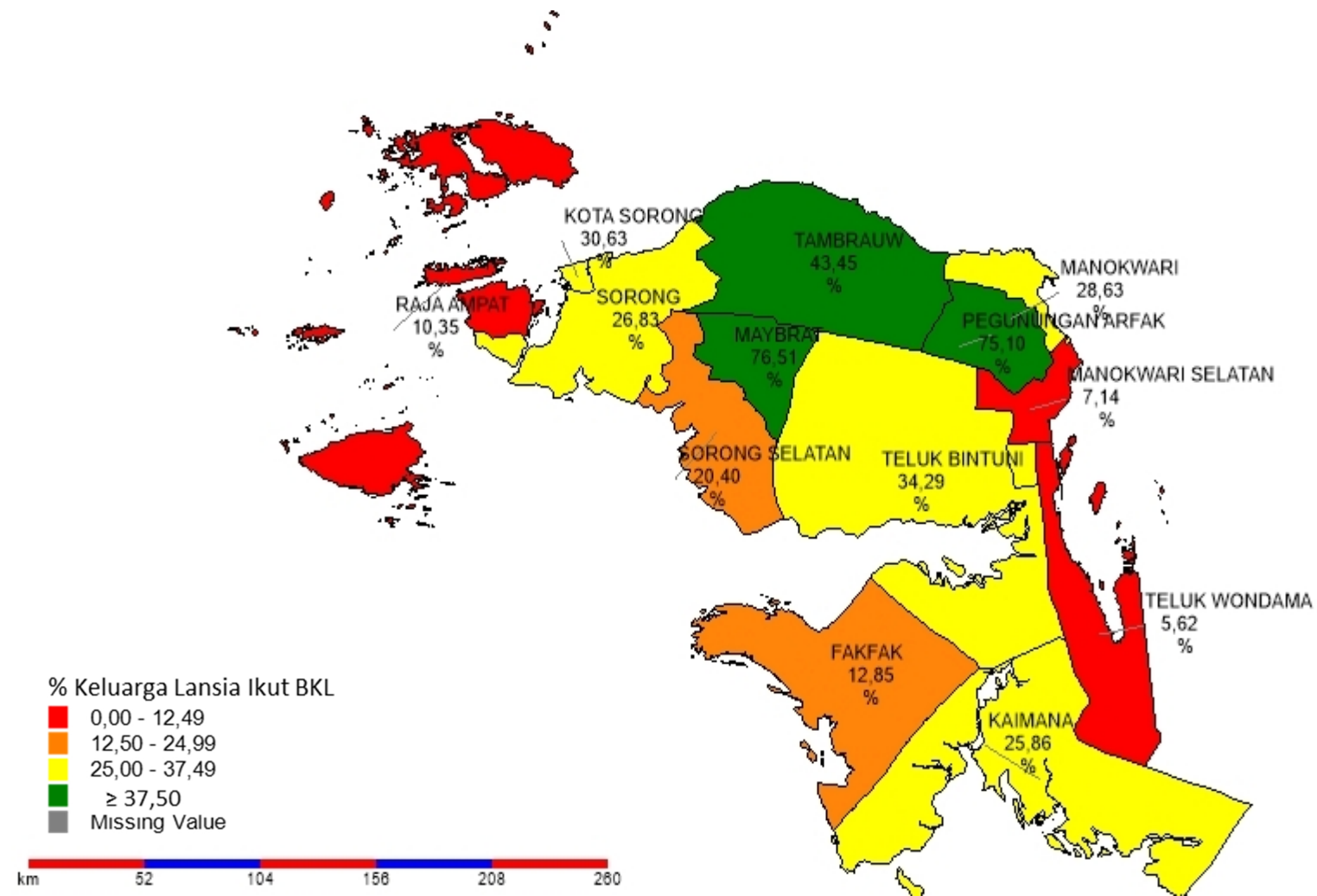
Tabel 37
Data Keluarga Lansia Provinsi Papua Barat

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Sorong	524	1.429	1.953	26,83%
2.	Manokwari	680	1.695	2.375	28,63%
3.	Fak-Fak	163	1.105	1.268	12,85%
4.	Sorong Selatan	143	558	701	20,40%
5.	Raja Ampat	62	537	599	10,35%
6.	Teluk Bintuni	204	391	595	34,29%
7.	Teluk Wondama	15	252	267	5,62%
8.	Kaimana	158	453	611	25,86%
9.	Tambrau	63	82	145	43,45%
10.	Maybrat	583	179	762	76,51%
11.	Manokwari Selatan	37	481	518	7,14%
12.	Pegunungan Arfak	196	65	261	75,10%
13.	Kota Sorong	1.105	2.503	3.608	30,63%
PROVINSI		3.933	9.730	13.663	28,79%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Teluk Wodama (5,62%), sedangkan persentase tertinggi adalah Maybrat (76,51%).

Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 35 Peta Kesertaan BKL Provinsi Papua Barat



34. Provinsi Papua

Di tingkat provinsi, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 22.670 keluarga, dimana 7.587 keluarga telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 15.083 belum menjadi anggota BKL. Ini berarti baru sekitar 33,47% sasaran yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL. Secara rinci, jumlah keluarga yang menjadi Kelompok Kegiatan BKL di masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

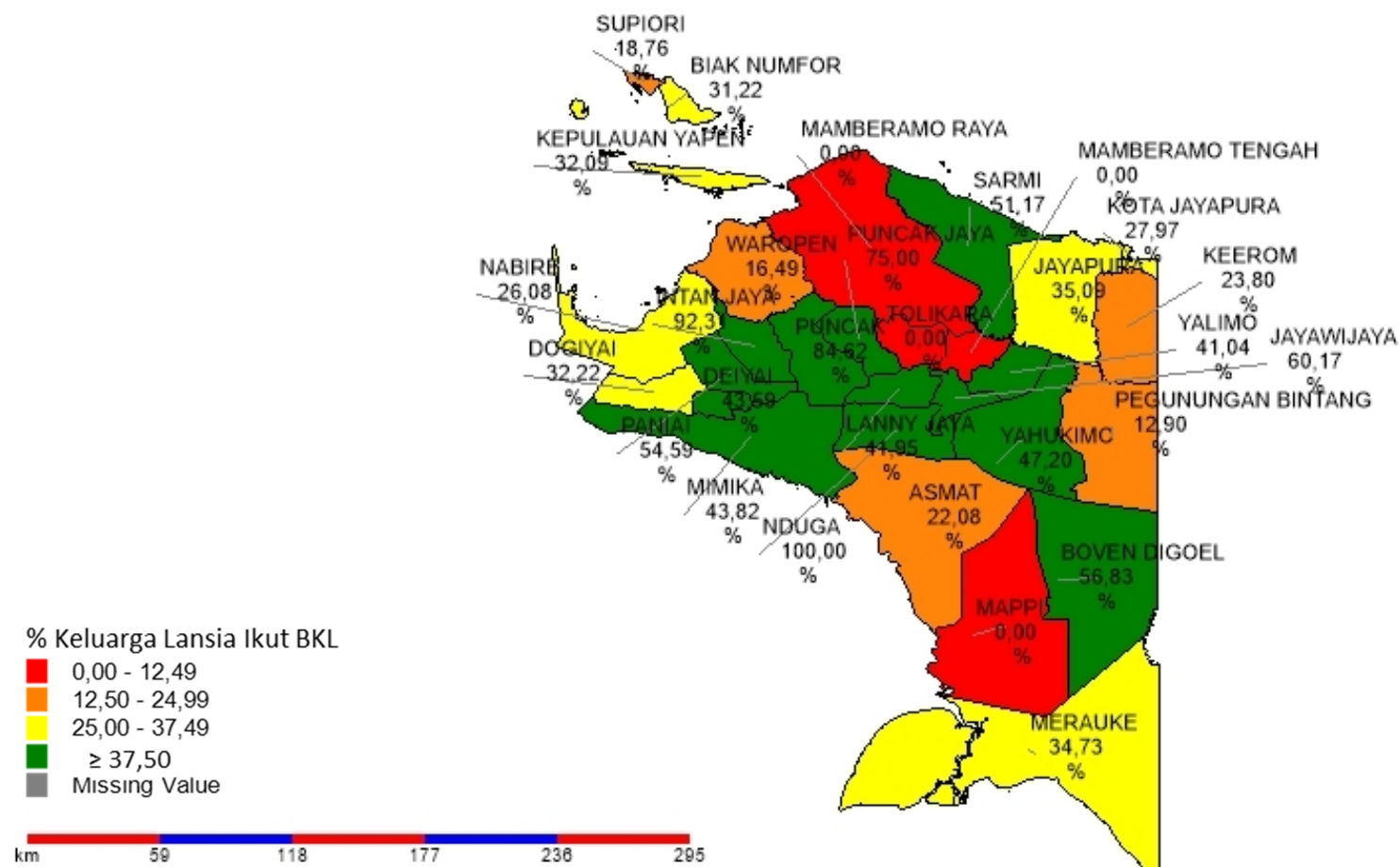
Tabel 38
Data Keluarga Lansia Provinsi Papua

NO	KABUPATEN	KELUARGA LANSIA			% IKUT BKL
		IKUT BKL	TIDAK IKUT BKL	JUMLAH SASARAN	
1.	Merauke	1.984	3.729	5.713	34,73%
2.	Jaya Wijaya	71	47	118	60,17%
3.	Jayapura	681	1.260	1.941	35,09%
4.	Nabire	442	1.253	1.695	26,08%
5.	Kepulauan Yapen	285	603	888	32,09%
6.	Biak Numfor	960	2.115	3.075	31,22%
7.	Puncak Jaya	3	1	4	75,00%
8.	Paniai	202	168	370	54,59%
9.	Mimika	273	350	623	43,82%
10.	Sarmi	196	187	383	51,17%
11.	Keerom	184	589	773	23,80%
12.	Pegunungan Bintang	8	54	62	12,90%
13.	Yahukimo	118	132	250	47,20%
14.	Waropen	80	405	485	16,49%
15.	Boven Digoel	179	136	315	56,83%
16.	Asmat	17	60	77	22,08%
17.	Supiori	94	407	501	18,76%
18.	Membramo Tengah	0	11	11	0,00%
19.	Yalimo	55	79	134	41,04%
20.	Lanny Jaya	469	649	1.118	41,95%
21.	Nduga	5	0	5	100,00%
22.	Puncak	11	2	13	84,62%
23.	Dogiyai	145	305	450	32,22%
24.	Intan Jaya	12	1	13	92,31%
25.	Deiyai	255	330	585	43,59%
26.	Kota Jayapura	858	2.210	3.068	27,97%
PROVINSI		7.587	15.083	22.670	33,47%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten dan Kota dengan persentase keluarga lansia ikut BKL terendah adalah Membramo Tengah, sedangkan persentase tertinggi adalah Nduga.

Terlihat pada tabel bahwa Kabupaten dan Kota Puncak Jaya, Nduga, Puncak, dan Intan Jaya memiliki persentase yang sangat tinggi namun jika dilihat jumlah keluarga lansia ikut BKL yang sangat kecil, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah kelompok BKL. Data pada Kabupaten dan Kota tersebut dianggap bias. Data tersebut dapat pula digambarkan dengan peta berikut ini.

Gambar 36 Peta Kesertaan BKL Provinsi Papua



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Keberhasilan suatu program lebih banyak ditentukan oleh strategi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Begitu juga dengan pencapaian target nasional untuk Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. Pencapaian jumlah lansia yang menjadi anggota BKL di lapangan akan tercapai apabila telah ditetapkan strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menentukan strateginya, terlebih dahulu dilakukan analisis pemetaan terhadap sasaran yang ada dan kondisi lapangan (jumlah SDM, wilayah, anggaran, dll).

Berdasarkan hasil pemetaan, secara nasional, jumlah keluarga lansia yang menjadi sasaran Kelompok Kegiatan BKL adalah 14.680.873 keluarga, dimana 3.130.892 keluarga atau 23,18% telah menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL dan 11.549.981 keluarga belum menjadi anggota BKL. Hal ini berarti masih sekitar 76,82% sasaran yang belum menjadi anggota Kelompok Kegiatan BKL. Jumlah ini tersebar di 34 provinsi dengan pola penyebaran yang bervariasi antar Provinsi maupun antar Kabupaten dan Kota. Provinsi yang persentase kesertaan keluarga lansia kedalam Kelompok Kegiatan BKL lebih dari 37,50% sebanyak 3 Provinsi, 25% - 37,49% sebanyak 8 Provinsi, 12,50% - 24,99% sebanyak 17 Provinsi, dan kurang dari 21,49% sebanyak 6 Provinsi. Hal ini menandakan masih banyak Provinsi yang pencapaian kesertaan anggota keluarga lansia dalam BKL masih

Untuk itu, pemetaan ini sangat penting sebagai acuan baik oleh Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten dan Kota dalam menetapkan strategi yang tepat. Dengan pemetaan ini diharapkan pencapaian target provinsi akan lebih dapat dicapai dengan anggaran yang terbatas.

B. SARAN

Untuk pencapaian target dalam pengelolaan program ketahanan keluarga lansia dan rentan, maka perlu memperhatikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pemantauan secara berjenjang yang terintegrasi kepada Kelompok Kegiatan BKL;
2. Perlu adanya peningkatan penggarapan program kelanjutusiaan terintegrasi lintas sektor;
3. Perlu adanya peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan sebagai data basis penggarapan program kelanjutusiaan
4. Perlu adanya peningkatan validasi pada data disetiap wilayah tingkatan operasional mulai dari tingkat provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan,

Desa/Kelurahan dan Kelompok Kegiatan BKL yang masih bias atau tidak lengkap;

5. Meningkatkan pencapaian target keluarga lansia ikut BKL melalui penetapan strategi kerja yang berdasarkan data di lapangan.
6. Perlu dibuat daerah sasaran prioritas program ketahanan keluarga lansia dan rentan sesuai dengan hasil analisis pemetaan.
7. Dengan masih banyaknya keluarga sasaran yang belum ikut Kelompok Kegiatan BKL maka perlu dilakukan sosialisasi dan promosi BKL melalui berbagai media
8. Untuk optimalisasi pelaksanaan program kelanjutusiaan, maka perlu dilakukan integrasi lintas sektor di tingkat lapangan.
9. Data pada pemetaan ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan prioritas spasial dalam pelaksanaan program untuk pencapaian target Renstra.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Pemetaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Pembinaan keluarga Lansia dan Rentan di seluruh tingkatan, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Kecamatan melalui pemetaan data nasional dan Provinsi. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan maksimal terhadap upaya pelaksanaan program KKBPK di seluruh Indonesia.

Data dalam Pemetaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam setiap penentuan prioritas garapan pada awal perencanaan, pada saat pelaksanaan dan pada saat monitoring dan evaluasi kegiatan. Mengingat laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sangat diharapkan sumbangan serta masukan dari berbagai komponen dan mitra kerja terkait.

